

Sinergi

Buletin BPIW

Media Informasi & Komunikasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR

KEMENTERIAN PUPR
BADAN PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR WILAYAH



Danau Toba

Borobudur

Mandalika

**Kementerian PUPR Realisasikan Dukungan
Terhadap 3 Kawasan Wisata
Menata Daerah Aliran Sungai Ciliwung**



Edisi 10/Oktober 2016



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
WILAYAH (BPIW) KEMENTERIAN PUPR**

INFRASTRUKTUR PUPR TERPADU UNTUK NEGERI

Gedung BPIW Lantai 1

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 11210

Email: humasbpiw@gmail.com

Telp. +6221-7279 8112

 www.bpiw.pu.go.id

 [@informasiBPIW](https://twitter.com/informasiBPIW)

 [Layanan Informasi BPIW](#)

Pelindung:

Rido Matari Ichwan

Penasehat:

Dadang Rukmana

Pengarah:

Hadi Sucahyono
Harris H. Batubara
Rezeki Peranginangin
Agusta Ersada Sinulingga

Pemimpin Redaksi:

P. Yudiantoro

Redaktur Pelaksana:

Shoviah

Redaksi:

M. Salahudin Rasyidi
Mochammad Tranggono
Hari Suharto Diyaksa
Erwin Adhi Setyadhi
Wahyu Hendrastomo
Melva Eryani Marpaung

Editor :

Hendra Djamel

Kontributor:

Mutri Batul Aini
Andina Dwiky
Ichlasul Naufal
Indira Dwi Kusumatuti
Daris Anugrah

Diterbitkan oleh:

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
(BPIW) Kementerian PUPR

Alamat Redaksi:

Gedung G, BPIW Lantai 1
Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 11210
Email: humasbpiw@gmail.com
Website: www.bpiw.pu.go.id
Twitter: [@informasiBPIW](https://twitter.com/informasiBPIW)
Youtube: Layanan informasi BPIW
No. Telp. +6221-2751 5804

Redaksi menerima tulisan/artikel/opini/foto yang berkaitan dengan bidang pengembangan infrastruktur dan keterpaduan wilayah dalam lingkup kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Redaksi berhak menyunting naskah/artikel yang masuk sesuai dengan tema penerbitan dan ketersediaan jumlah halaman/rubrik.

Tulisan dapat dikirim ke email:
humasbpiw@gmail.com

Design : Heri Hito

SALAM REDAKSI

Pembaca yang budiman, pada Buletin Sinergi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) edisi bulan Oktober ini kami akan memfokuskan soal dukungan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kabar Utama akan mengupas mengenai dukungan infrastruktur terhadap 3 Kawasan Strategis Prioritas Nasional (KPSN). Dalam membahas lebih lanjut mengenai hal tersebut, kami menghadirkan Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW Kementerian PUPR, Rezeki Peranginangin dalam rubrik wawancara.

Pada rubrik tersebut dibahas seputar peran infrastuktur PUPR dalam mendukung pembangunan kawasan strategis. Untuk laporan khusus dibahas mengenai Dukungan Kementerian PUPR terkait Penataan DAS Ciliwung. Dalam rubrik opini diisi Kepala Bagian Anggaran dan Umum, Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Melva Eryani Marpaung, ST, MUM.

Pada opini tersebut dibahas mengenai development plan dan sistem manajemen mutu di Pusat Pengembangan kawasan Perkotaan. Pembaca juga dapat menikmati sajian informasi mengenai kegiatan BPIW sepanjang bulan Oktober, melalui rubrik Kilas BPIW. Tidak hanya itu, sajian ringan juga telah disiapkan tim redaksi seperti rubrik Jalan-Jalan yang menampilkan salah satu pulau, yakni Pulau Karimata.

Dalam rubrik Tips dibahas mengenai keseimbangan hidup dalam bekerja. Kemudian pada rubrik Glossary menampilkan istilah tentang pelayanan publik. Kami berharap apa yang disajikan dapat memperkaya wawasan pembaca.

Selamat membaca.



daftar isi

Edisi 10 - Oktober 2016



01 SALAM REDAKSI

02 DAFTAR ISI

03 PERSPEKTIF

Optimalisasi Potensi Pariwisata dan Kawasan DAS

04 KABAR UTAMA

Kementerian PUPR Realisasikan Dukungan Terhadap 3 Kawasan Wisata

10 REVIEW

Panduan Internasional tentang Perencanaan Kota dan Wilayah

11 GLOSSARY

Istilah Tentang Informasi Publik

12 WAWANCARA

Pembangunan Infrastruktur Berbasis Wilayah tingkatkan Daya Saing Kawasan

16 TEROPONG MEDIA

Infrastruktur PUPR Dalam Media Cetak

18 KILAS BPIW

BPIW Dukung Pengembangan Infrastruktur di Ternate

40 LAPORAN KHUSUS

Menata Daerah Aliran Sungai Ciliwung

44 OPINI

Development Plan dan Sistem Manajemen Mutu di Pusat Pengembangan kawasan Perkotaan

50 JALAN-JALAN

Selat Karimata, Potensi Wisata Bahari yang Tersembunyi

52 WPS Corner

Wilayah Pengembangan Strategis 13 & 14

54 INFOGRAFIS

Keterpaduan Terhadap Pengembangan Kawasan Metropolitan 2015-2019 (Perkotaan)

56 TEKNOLOGI

Teknologi Bidang Jalan dan Jembatan Mendukung 10 KSPN

58 POTRET

Sail Karimata 2016

60 TIPS

Menjaga Keseimbangan Kehidupan Kerja Dengan Kehidupan Pribadi

61 TOKOH

Acep Purnama
Pembangunan Infrastruktur Harus Berkelanjutan

Optimalisasi Potensi Pariwisata dan Kawasan DAS

Target kunjungan turis mancanegara yang datang ke Indonesia hingga 2019 dipatok mencapai 20 juta orang. Langkah yang ditempuh untuk mencapai target tersebut, pemerintah memprioritaskan pengembangan 10 dari 25 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Ke-10 KSPN yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Tanjung Kelayang (Pulau Belitung), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Tanjung Lesung (Banten), Borobudur (Jawa Tengah), Bromo-Tengger-Semeru (Jawa Timur), Mandalika (NTB), Laboan Bajo (NTT), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), dan Morotai (Maluku Utara).

Dari 10 KSPN tersebut, ada tiga destinasi wisata yang difokuskan untuk dikembangkan. Ketiga kawasan wisata tersebut yakni Danau Toba, Borobudur, dan Mandalika. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) telah memiliki sejumlah perencanaan pembangunan infrastruktur yang segera direalisasikan pembangunannya oleh empat Ditjen, yakni Sumber Daya Air (SDA), Cipta Karya, Bina Marga, dan Penyediaan Perumahan. Bahkan telah dibuat timeframe atau jangka waktu dari pengembangan tiga destinasi wisata tersebut.

Tidak hanya pariwisata nasional, Kementerian PUPR melalui BPIW juga menyiapkan perencanaan dalam mendukung penataan sungai, terutama penataan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung

di DKI Jakarta. Penataan ini dilakukan dalam upaya memperbaiki kualitas lingkungan dan mengontrol derajat kehidupan warga lewat hunian yang layak.

Oleh karena itu, DAS Ciliwung memiliki peran strategis dan kerap menjadi isu nasional. Sehingga, wajar kawasan tersebut mendapat salah satu pusat perhatian pihak-pihak terkait. Untuk meningkatkan fungsi sungai dan kualitas lingkungan di sekitarnya dibutuhkan banyak inovasi dalam mengelola DAS Ciliwung, agar sungai yang berhulu di kawasan Bogor ini dapat selalu berfungsi dengan ideal. Saat ini Kementerian PUPR telah memiliki sejumlah program dalam rangka mengoptimalkan fungsi sungai tersebut.

Salah satunya penataan sungai dengan peremajaan kawasan dan pembangunan rumah susun sewa (Rusunawa) di sekitar DAS Ciliwung. Prioritas penataan dengan peremajaan kawasan di area DAS Ciliwung meliputi kawasan Pasar Rumpit, Pasar Minggu, Rawabebek, Kebon Baru serta Cawang. Dengan dukungan Kementerian PUPR terhadap kawasan pariwisata dan DAS ini dapat meningkatkan perekonomian daerah setempat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (**)



Kementerian PUPR Realisasikan Dukungan Terhadap 3 Kawasan Wisata



Keindahan Danau Toba yang menjadi salah satu prioritas KSPN di Tahun 2017.

Sumber: Dok. BPIW

Pemerintah menargetkan kunjungan turis mancanegara yang datang ke Indonesia, mencapai 20 juta orang tahun 2019. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah memprioritaskan pengembangan 10 dari 25 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Ke-10 KSPN yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Tanjung Kelayang (Pulau Belitung), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Tanjung Lesung (Banten), Borobudur (Jawa Tengah), Bromo-Tengger-Semeru (Jawa Timur), Mandalika (NTB), Laboan Bajo (NTT), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), dan Morotai (Maluku Utara). Dari 10 KSPN tersebut, ada tiga destinasi wisata yang difokuskan untuk dikembangkan. Ketiga kawasan wisata tersebut yakni Danau Toba, Borobudur, dan Mandalika. Sejumlah program telah disiapkan Kementerian PUPR, dimana awal tahun 2017 mendatang, proses konstruksi infrastruktur PUPR mulai dilakukan.



Percepatan pengembangan tiga kawasan pariwisata terus dilakukan pemerintah. Wakil Presiden, Jusuf Kalla bahkan menggelar rapat dengan instansi terkait di kantornya akhir Oktober lalu. Pada saat memimpin rapat, Kalla menargetkan di tahun 2019 ketiga destinasi wisata prioritas tersebut semuanya sudah rampung. Sesuai dengan arahan Jusuf Kalla, pengembangan kawasan pariwisata Borobudur akan diintegrasikan dengan kawasan pariwisata di sekitarnya seperti Candi Mendut, Candi Prambanan dan Keraton. Sedangkan kawasan wisata Mandalika, pembangunannya harus memperhatikan kenyamanan turis, terutama yang berasal dari Timur Tengah. Hal ini dikarenakan banyak turis dari Timur Tengah yang berkunjung ke Mandalika. "Planning sudah terintegrasi, awal bulan depan

akan sudah ada finalisasinya dan nantinya akan terlihat siapa yang akan berbuat apa sehingga ada *backward planning*-nya," tegas Kalla.

Pengembangan pariwisata di Indonesia,

Total dana yang dibutuhkan mencapai Rp 200 triliun untuk pengembangan 10 KSPN hingga 2019 mendatang. Sedangkan rata-rata per tahun untuk pembangunan infrastruktur pariwisata mencapai Rp 6 triliun.

membutuhkan dana yang besar. Menteri Pariwisata, Arief Yahya mengatakan bahwa saat ini total dana yang dibutuhkan mencapai Rp 200 triliun untuk pengembangan 10 KSPN hingga 2019 mendatang. "Sedangkan

rata-rata per tahun untuk pembangunan infrastruktur pariwisata mencapai Rp 6 triliun, maka jika dikalikan sampai dengan tahun 2019, Pemerintah hanya sanggup sebanyak Rp 30 triliun," tutur Arief.

Untuk itu, Pemerintah saat ini sedang menggenjot pembiayaan dari pihak lain. Salah satunya dengan melakukan bekerja sama dengan World Bank dan beberapa *private investment*, terutama untuk tiga kawasan pariwisata yang prioritas.

Sehubungan dengan hal itu, Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur

Wilayah (BPIW) telah memiliki sejumlah perencanaan pembangunan infrastruktur yang segera direalisasikan pembangunan fisiknya oleh empat Ditjen, yakni Sumber Daya Air (SDA), Cipta Karya, Bina Marga, dan

Penyediaan Perumahan.

Bahkan telah dibuat *timeframe* atau jangka waktu dari pengembangan tiga destinasi wisata tersebut. *Timeframe* untuk Kementerian PUPR, yakni September hingga November 2016 melakukan Analisis Kebutuhan Infrastruktur (PUPR dan World Bank) dan Proses Pemilihan Kriteria untuk Program 2017 (PUPR dan World Bank). Selanjutnya pada November 2016 hingga Januari 2017 dilakukan proses lelang untuk konstruksi.

Kemudian dari Januari 2017 hingga November 2017 merupakan pelaksanaan konstruksi Infrastruktur. Pada saat konstruksi infrastruktur berjalan, maka pada November 2016 hingga Maret 2017 akan dilakukan proses lelang internasional (untuk *loan* dan Hibah World Bank).

Selanjutnya, Maret 2017 hingga November 2017 dilakukan Penyusunan Rencana Terpadu Destinasi Pariwisata (*Loan* dan Hibah World Bank). Juli 2017 hingga November 2017 dilakukan Input untuk Program Pembangunan Infrastruktur 2018 berdasarkan Rencana Terpadu Destinasi

Pariwisata.

Saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah menyampaikan surat dari Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait

Maret 2017 hingga November 2017 dilakukan Penyusunan Rencana Terpadu Destinasi Pariwisata (*Loan* dan Hibah World Bank). Juli 2017 hingga November 2017 dilakukan Input untuk Program Pembangunan Infrastruktur 2018

dengan pengusulan kegiatan penyusunan *Intergrated Masterplan* untuk tiga destinasi wisata prioritas yaitu Danau Toba, Borobudur dan Mandalika ke dalam Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN)/ *Green Book* 2016 dan Daftar Rencana Kegiatan Hibah (DRKH), serta pengusulan penggunaan mekanisme *Project Preparation Funding* (PPF) dan *Program Project Preparation Assistance* (PPA) untuk kegiatan penyusunan *Intergrated Masterplan* untuk

3 destinasi wisata prioritas kepada *World Bank*.

Lebih lanjut Rido menjelaskan, saat ini juga tengah dilakukan proses pembentukan tim lelang/Pokja dan proses penyiapan pengumuman lelang, serta finalisasi *Term of Reference* (TOR) untuk kegiatan penyusunan *Intergrated Masterplan* pada tiga destinasi wisata prioritas tersebut. "Kementerian PUPR akan mendukung penuh dari segi infrastruktur baik dari segi akses, peningkatan sumber daya air, keciptakaryaannya, maupun penyediaan perumahan," tegas Rido.

Berikut uraian pembangunan infrastruktur di tiga kawasan pariwisata :

1. Danau Toba

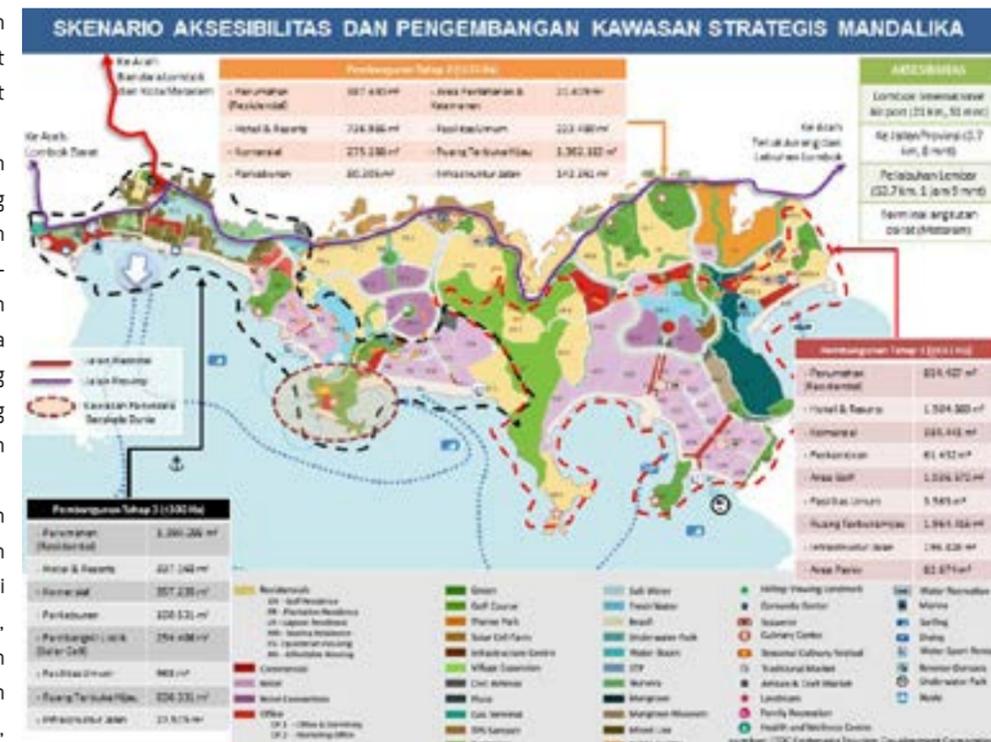
Berdasarkan *development plan* tahun 2015-2019, ada 10 program pembangunan infrastruktur yang sedang dan akan Ditjen Bina Marga. Ke-10 program tersebut diantaranya pembangunan Jalan Tol Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi (2016-2017), pembangunan Jalan Tol Tebing Tinggi - Siantar - Parapat (2017-2019), dan Paket

Preservasi dan Pelebaran Jalan Tebing Tinggi-P. Siantar-Parapat atau Jalan Lingkar Luar Parapat (2016-2018).

"Pada pengembangan kawasan Danau Toba saat ini sedang dalam proses pembangunan Jalan Tol Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi yang ditargetkan selesai pada tahun 2017 dan juga pembangunan Jalan Tol Tebing Tinggi - Siantar - Parapat yang ditargetkan selesai pada tahun 2019," tutur Rido.

Kemudian juga dilakukan pembangunan Jalan Pangururan - Ambarita - Tomok - Lagundi - Onan Runggu (2016-2019), Preservasi dan Pelebaran Jalan Tele - Pangururan - Nainggolan - Onan Runggu (2016-2019), dan Rekonstruksi Jalan Sp. Bandara Silangit - Muara (2016). Selanjutnya pembangunan Jembatan Tano Ponggol di Kab. Samosir (2016-2019), dan Jalan *By Pass* lingkaran luar (Longat - Tambunan 10,1km) di Kota Balige (2017-2019), jaringan jalan kolektor primer Tigaras - pematang Siantar (2018 -2019), dan Jalan Akses Bandara Sibisa (Aek Natolu - Sibisa sepanjang 2,5 Km (MYC) (2016-2017).

Tidak hanya itu, ada 12 program pembangunan infrastruktur yang sedang dan akan dilaksanakan Ditjen SDA. Ke-12 pembangunan infrastruktur itu adalah Peningkatan embung Aek Natonang di Kabupaten Samosir. Program tersebut sudah pada tahap konstruksi dan dibangun pada periode 2016-2017. Selanjutnya ada program Pemeliharaan/Pembersihan Enceng Gondok di Danau Toba (2016-2017). Kemudian ada pembangunan Bendung dan Jaringan Di. Sidilanitano 2.420Ha, Kec. Siborong-borong, Kab. Tapanuli Utara (2016- 2017)



dan Perbaikan Tanggul Aek Sigeaon di Kec. Sipoholon, Kab. Tapanuli Utara (2016). Selain itu dilakukan pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Timuran Syahuda; Kab. Simalungun; 14,3 Km; 0,050 m3/ det (2016), dan Normalisasi Saluran Tanah Ponggol (2016 - 2018).

Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR memiliki empat program pembangunan infrastruktur untuk mendukung pariwisata di Sumatera Utara. Ke-4 program tersebut adalah Pembangunan Sanimas di Kab. Dairi, Kab. Simalungun, dan Humbang Hasundutan (2016), Penyusunan RTBL Kawasan Wisata Danau Sidihoni Kec. Ronggur Nihuta di Kab Samosir (2017)

Kementerian PUPR melalui Ditjen SDA ini juga mendukung pengembangan Danau Toba dalam hal pembangunan Embung di Kab. Samosir (Pea Nauli Parsinagaan, Pea Rihit, Pea Tahoran, Pea Nadea, Julu Ni Aek

pada periode 2017 - 2018. Tak lupa juga akan dilaksanakan pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Pariwisata Danau Toba (2017), Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa Paya Lahlah Kab. Karo(4000 Ha), Perbaikan Alur Sungai Binanga Bolon Desa Sakkal, Kec. Simanindo (5 Km), Perbaikan Saluran drainase di Kab. Karo 19 Km (2017), dan Optimalisasi sarana prasarana penyediaan dan pengelolaan airbaku Kab Simalungun (2018).

Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR memiliki empat program pembangunan infrastruktur untuk mendukung pariwisata di Sumatera Utara. Ke-4 program tersebut adalah Pembangunan Sanimas di Kab. Dairi, Kab. Simalungun, dan Humbang Hasundutan (2016), Penyusunan RTBL Kawasan Wisata

Danau Sidihoni Kec. Ronggur Nihuta di Kab Samosir (2017), Penyediaan prasarana air limbah bagi masyarakat di daerah kumuh padat perkotaan (2018 - 2019), dan Pembangunan TPS 3R di Kawasan Pariwisata



Sumber: Shutterstock



Borobudur menjadi salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional di Tahun 2017.

Danau Toba (2018 – 2019). Urusan tempat tinggal juga menjadi perhatian Kementerian PUPR. Melalui Ditjen Penyediaan Perumahan, ada tiga program pembangunan infrastruktur yang sedang dan akan dilaksanakan. Ke-3 program tersebut adalah pembangunan rumah susun mahasiswa 114 unit, 5 lantai, tipe 24 di Sekolah Teknologi Del Tapanuli Tengah, Kec Laguboti, Kab. Toba Samosir (2016), pembangunan baru dan peningkatan kualitas rumah swadaya 1050 unit (2017 – 2019). Kemudian juga adan Pengembangan kawasan permukiman baru sebagai *homestay* (2018 – 2019).

2. Borobudur

Dukungan Kementerian PUPR dalam mengembangkan Kawasan Pariwisata Candi Borobudur juga tercantum dalam *development plan* 2015-2019. Ada 6 program pembangunan infrastruktur PUPR yang dilaksanakan Ditjen Bina Marga. Ke-6 program tersebut adalah Preservasi Pemel.

Rutin Jalan Parakan-Secang- Magelang-Bts Jogja (2016), Rutin Jalan bts Kota Magelang Keprekan (2017), dan Pelebaran Jln Urip Sumoharjo Magelang (2017). Selain itu Rekonstruksi Jln Suraji Tirtonegoro Klaten (2018), Pembangunan Jalan Tol Yogya Bawen, Kab. Magelang (2018 – 2019), dan pengembangan Jalan Kolektor Jlur

Dukungan Kementerian PUPR dalam mengembangkan Kawasan Pariwisata Candi Borobudur juga tercantum dalam *development plan* 2015-2019. Ada 6 program pembangunan infrastruktur PUPR yang dilaksanakan Ditjen Bina Marga.

Magelang-salatiga, Magelang-Boyolali (2018 – 2019).

Tidak hanya itu, Kementerian PUPR melalui program yang dilaksanakan Ditjen SDA juga untuk mendukung kawasan Pariwisata Borobudur. Program tersebut adalah

Peningkatan Fungsi Lindung Berupa Kawasan Sempadan Sungai Di Kawasan Borobudur (2017), Pengamanan Sungai Progo dan Sungai Elo (2017), Pengendalian Banjir di Sungai Progo (2017), dan Rehabilitasi fungsi lindung daerah resapan air Kawasan Borobudur (2018). Kemudian dukungan juga dilakukan melalui program yang dijalankan Ditjen Cipta

Karya yakni Optimalisasi IPLT Kota Magelang (2016), Pembangunan TPS 3R Kab. Magelang (2016), Optimalisasi IPLT Kota Magelang (2017), dan FS Air Minum Kawasan Borobudur (2018). Pembangunan Rumah Swadaya kabupaten Magelang (2017) juga akan dilaksanakan Kementerian PUPR melalui Ditjen Penyediaan Perumahan.

3. Mandalika

Dukungan pengembangan kawasan Pariwisata Mandalika juga dilakukan Kementerian PUPR. Dalam *development plan* 2015-2019 sejumlah program sedang dan akan dilakukan. Program Kementerian PUPR yang dijalankan Ditjen Bina Marga

yakni Pembangunan Jalan Gerung (Patung Sapi) – Mataram 2 KM (2016), Preservasi Dan Pelebaran Jalan Pemenang - Bayan - Sembalun Bumbung 1,5 KM (2016), Peningkatan Struktur Jalan Sulin-Penujak 4 KM (2016), dan Peningkatan Jembatan Sulin 120 M (2016).

Selain itu sebanyak 12 program dilaksanakan Ditjen SDA yakni Bayan di Kabupaten Lombok Utara seluas 154 Ha (2015), pembangunan Drainase Primer Kota Gerung 7 km (2016), Pembangunan Sistem Jaringan Air Baku Remening 8 KM (2016), dan pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku di Pulau Lombok 6 Titik (2016).

Kemudian juga ada Pembangunan Sistem Jaringan Air Baku Sekeper 8 KM (2016), pembangunan Sistem Penyediaan Air Baku MA Singang Pitu Nai di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara (2017), Normalisasi Alur Sungai Pakendangan di Kabupaten Lombok Timur (2017), dan pembangunan Embung Serbaguna Bangkat

Lamin di Kabupaten Lombok Tengah (2017). Selanjutnya ada program pembangunan Embung Bangka di Kab Lombok Tengah (2017), Pengaman Pantai Ampenan Jeti Sungai Meninting di Kota Mataram (2017), Embung Rakyat di WS Lombok (2017), dan

Ada program pembangunan Embung Bangka di Kab. Lombok Tengah (2017), Pengaman Pantai Ampenan Jeti Sungai Meninting di Kota Mataram (2017), Embung Rakyat di WS Lombok (2017), dan pembangunan Bendungan Mujur Lombok Tengah (2018-2019).

pembangunan Bendungan Mujur Lombok Tengah (2018-2019).

Enam program dukungan Kementerian PUPR yang dijalankan Ditjen Cipta Karya yakni Permukiman Perdesaan Kws. Strategis Gangga Kec. Gangga (2015), Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat

Kawasan Gili Trawangan (2015), dan Pengembangan SPAM IKK Narmada (Sistem Remening) (2016). Program selanjutnya untuk pengembangan kawasan pariwisata Mandalika adalah pembangunan Infrastruktur Permukiman Kumuh Kawasan

Kota Mataram (2016), Penataan Bangunan Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Praya Kec. Praya (2016), dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Mataram (2017).

Program PUPR yang dilaksanakan Ditjen Penyediaan Perumahan untuk pengembangan kawasan Mandalika yakni Penyediaan Rumah Susun Kab. Lombok Utara (2015), Peningkatan Kualitas Rumah

Swadaya kota mataram 2000 Unit (2016), dan pembangunan Rusunawa di Kab Lombok Tengah 66 Unit (2017).



Tanjung Aan, salah satu pantai di Mandalika.

Sumber: Dok. BPIW



Pembangunan Infrastruktur Berbasis Wilayah tingkatkan Daya Saing Kawasan

Ir. Rezeki Peranginangin, M, Sc, MM

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis

Jelang akhir tahun ini, banyak program yang dilakukan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR terutama melalui Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, mulai dari penyusunan masterplan 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), program dukungan terhadap Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), hingga Anjungan Cerdas. Pembangunan infrastruktur

tersebut dilakukan berbasis pengembangan wilayah agar ke depannya sebuah kawasan memiliki daya saing tinggi. Seperti apa sebenarnya program yang telah dilakukan dalam mendukung pengembangan kawasan strategis? Berikut penjelasan Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis BPIW Kementerian PUPR, Ir. Rezeki Peranginangin, M.Sc, MM.

Hingga pertengahan tahun ini, program apa saja yang sudah dilakukan terkait pengembangan kawasan strategis ?

Kita telah menyusun program – program PUPR pada KSPN prioritas, baik masing-masing unit organisasi Kementerian PUPR termasuk BPIW. Sebagai salah satu contoh adalah dukungan infrastruktur PUPR terhadap KSPN Danau Toba. Tahun 2015, BPIW telah menyusun *masterplan* dan *development plan* untuk kawasan Danau Toba. Ditjen Bina Marga membangun jalan tol Medan –Kualanamu – Tebing Tinggi, 2016 –2017, paket presevasi dan pelebaran jalan Tebing Tinggi – P. Siantar – Parapat yang merupakan jalan lingkar luar prapat. Pelebaran jalan dilakukan tahun ini. Kemudian juga sedang dilakukan rekonstruksi jalan Sp. Bandara Silangit – Muara. Pembangunan ini ditargetkan selesai tahun ini.

Untuk Lingkar Samosir, proses konstruksi akan dilakukan tahun depan (2017) MYC diantaranya, Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan Pangururan – Ambarita –Tomok – Lagundi – Onan Runggu dan Presevasi Pelebaran Jalan Tele – Pangururan –Nainggolan – Onan Runggu. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR melalui Ditjen Sumber Daya Air atau SDA seperti peningkatan embung Aek Natanang di Kabupaten Samosir. Pembangunan tersebut memasuki tahap konstruksi tahun ini. Selanjutnya, pembangunan *intake* dan jaringan Pipa Transmisi Air Baku Timuran Syahuda; kab Simalungun; 14,3 Km; 0,050 m³/det; dan Penyusunan DED Normalisasi Tano Ponggol.

Ditjen Cipta Karya memiliki program pembangunan Sanimas di kabupaten Dairi, Simalungun, dan Humbang Hasundutan. Program tersebut telah memasuki tahap konstruksi tahun ini. Selanjutnya ada pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan Kecamatan Siborong – Borong – Kabupaten Tapanuli Utara, Toba Samosir, Permukiman Hasundutan. Pembangunan di beberapa daerah itu sudah memasuki tahap konstruksi, tahun ini. Selanjutnya dilakuka pembangunan PSU Rumah Umum berjumlah 62 unit di Grand Paviliun, Kabupaten Dairi pada tahun ini.

Kementerian PUPR melalui Perumahan Rakyat melakukan program pembangunan rumah susun, pada tahun ini dibangun rumah susun untuk mahasiswa sebanyak 114 unit, 5 lantai, tipe 24 di Sekolah Teknologi Del Tapanuli Tengah, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir.

Selain itu, juga direncanakan pembangunan Anjungan Cerdas Bendungan Tugu – Trenggalek dan Anjungan Cerdas Rambut Siwi – Bali sudah mulai dalam tahap pematangan lahan dan ekspos desain. Kemudian juga sudah mulai dilakukan beberapa kegiatan seperti pemasangan direksi keet dan pagar keliling proyek.

Apa yang menjadi tantangan dalam melaksanakan program itu?

Salah satu tantangan yang kita hadapi adalah masalah koordinasi dalam menterpadukan rencana pembangunan dan sinkronisasi program masing – masing unit organisasi internal PUPR, antar sektor, dan antar tingkat pemerintahan.

Bagaimana mengatasi tantangan tersebut?

Solusinya adalah kita melaksanakan penyusunan rencana aksi tahunan dan MoU yang dapat mensinkronkan program semua unit organisasi guna menghindari pembangunan yang dilakukan secara sektoral, yang dapat menyebabkan infrastruktur yang telah dibangun tidak bermanfaat secara optimal.

Apa yang ingin dicapai dari rencana pengembangan WPS di

pulau –pulau besar di Indonesia, seperti pulau Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku?

Pembangunan infrastruktur berbasis Wilayah Pengembangan Strategis atau WPS merupakan suatu pendekatan pembangunan yang memadukan antara pengembangan wilayah dengan *market driven* atau mendorong pasar, mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, memfokuskan pengembangan infrastruktur menuju wilayah strategis, mendukung percepatan pertumbuhan kawasan, dan mengurangi disparitas antar kawasan.

Ke-35 WPS ini mencakup pulau – pulau besar yang terbagi kedalam tiga klasifikasi, yakni WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang,

Kita telah menyusun program – program PUPR pada KSPN prioritas, baik masing-masing unit organisasi Kementerian PUPR termasuk BPIW. Sebagai salah satu contoh adalah dukungan infrastruktur PUPR terhadap KSPN Danau Toba.

Pusat Pertumbuhan Terpadu, dan Pusat Pertumbuhan Baru. Untuk WPS di Pulau Jawa terdiri dari WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang dan didominasi oleh WPS di Pusat Pertumbuhan Terpadu. Sedangkan WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang, yang menunjukkan bahwa disparitas tersebut tidak hanya terjadi antara kawasan Barat Indonesia dengan kawasan Timur Indonesia, namun hal tersebut juga terjadi di dalam antar WPS di Pulau Jawa, Sumatera, dan di Bali. Perbedaan ini harus dikurangi. Pada Kawasan Timur Indonesia, sebagian besar masih didominasi oleh WPS Pusat Pertumbuhan Baru.

Selain itu pembangunan infrastruktur PUPR juga membangun kawasan perbatasan dan mendukung pembangunan pulau terluar. Dapat diakui bahwa tantangan yang dihadapi

tidak mudah, seperti membangun infrastruktur Pulau Kalimantan dan Pulau Papua. Pada Pulau Kalimantan didominasi oleh WPS Pertumbuhan Baru yang merupakan WPS Perbatasan Negara. Saat ini sedang dibangun jalur perbatasan Zeni TNI Angkatan Darat dan pos lintas batas oleh Ditjen Cipta Karya.

Sedangkan untuk Pulau Papua, sebaran WPS masih didominasi oleh Pusat Pertumbuhan Baru. Kita memiliki tiga strategi untuk membangun Wilayah Papua. Pertama, membangun jalan menuju jalan Trans Papua, yang termasuk ke dalam empat WPS, yakni Sorong – Manokwari, Biak- Manokwari-Bintuni, Nabire-Enarotoli-Wamena, dan Jayapura – Merauke. Kedua, menghubungkan kawasan dalam WPS, dan termasuk kawasan perbatasan dengan negara Papua. Untuk kawasan yang menuju Fak-fak dibangun untuk menghubungkan titik-titik ekonomi, contohnya kawasan industri Bintuni. Target waktu pelaksanaan program perlu dibuat untuk seluruh rencana pembangunan infrastruktur pada seluruh wilayah di Indonesia, sehingga dapat terlihat jelas *outcome* dan *output*, serta *impact* dari pembangunan infrastruktur tersebut.

Apa yang selanjutnya dilakukan setelah dibuatnya rencana pengembangan WPS?

Rencana pengembangan WPS menghasilkan program yang sudah diidentifikasi, termasuk perencanaannya, dan program tersebut diupayakan keterpaduannya dengan dikomunikasikan dengan perencana di daerah, untuk diajukan kepada masing-masing unit organisasi. Sinkronisasi program infrastruktur diperlukan untuk meningkatkan strategi dalam meningkatkan atau menciptakan spesialisasi, komplementarisasi atau saling isi, sinergi dan skala ekonomi, guna menyiapkan wilayah dan kawasan atau perkotaan yang ke depannya memiliki daya saing tinggi.

Dalam hal ini Pusat Perencanaan Instrakstruktur PUPR BPIW melakukan penyusunan *development plan* untuk tujuh pulau maupun kepulauan, yakni Pulau Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku Utara, dan Papua Barat. Fokus pengembangan



yang dilakukan pusat tersebut adalah konektivitas dan air. Hal itu dilakukan, karena konektivitas menghubungkan semua WPS maupun non WPS, dan didalam sebuah WPS belum tentu dilengkapi dengan infrastruktur yang dibutuhkan. Tahap selanjutnya menjadi tugas Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR BPIW dalam hal penajaman program yaitu pada Bidang penyusunan Program dan Bidang Sinkronisasi dan Pembiayaan Program.

Salah satu program yang dilakukan BPIW melalui Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, adalah Anjungan Cerdas. Apa sebenarnya Anjungan Cerdas itu ?

Anjungan Cerdas adalah fasilitas umum di dalam satu kawasan terintegrasi yang terletak di pinggir jalan nasional, yang berfungsi untuk melayani pengguna jalan serta masyarakat lokal dengan fungsi informasi, promosi, edukasi, dan pariwisata yang dilengkapi aktivitas penunjang dan dibangun oleh penyelenggara jalan. Anjungan Cerdas merupakan representasi dari karakteristik unik setiap daerah dan menyediakan informasi daerah setempat, yang dilengkapi dengan berbagai layanan dan kegiatan yang dapat dinikmati oleh pelanggan.

Sinkronisasi program infrastruktur diperlukan untuk meningkatkan strategi dalam meningkatkan atau menciptakan spesialisasi, komplementarisasi atau saling isi, sinergi dan skala ekonomi, guna menyiapkan wilayah dan kawasan atau perkotaan yang ke depannya memiliki daya saing tinggi.

Anjungan Cerdas memiliki beberapa fungsi yaitu untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas yang mencapai 30 ribu korban jiwa per tahun yang berkolasi pada antara pusat kota yang dihubungkan oleh jalan nasional untuk membuat satu destinasi baru yang dapat mempertemukan pengguna jalan dengan produk lokal.

Apa yang menjadi tujuan dari pembangunan Anjungan Cerdas?

Menyediakan tempat istirahat dan sekaligus menjadi embrio destinasi wisata serta rekreasi baru dengan memanfaatkan secara maksimal lokasi, pemandangan, keragaman produk lokal, seni penampilan atau performance art dan teknologi infrastruktur, dengan nilai – nilai ketersediaan layanan secara

memadai, keberlanjutan, berkeselamatan, dan cerdas. Selain difungsikan sebagai tempat istirahat, Anjungan Cerdas juga menyediakan destinasi alternatif yang akan meningkatkan nilai guna infrastruktur jalan, dengan memanfaatkan lokasi, pemandangan, keragaman produk lokal, kesenian berupa produk kesenian dan pertunjukan, dan teknologi infrastruktur.

Perkembangan ekonomi kawasan akan meningkat dengan adanya konektivitas kawasan dengan pasar regional dan nasional serta adanya outlet dan media promosi produk lokal di Anjungan Cerdas. Dengan demikian, Anjungan Cerdas diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai dimensi infrastruktur yang multi sektor maupun multi guna, untuk menjembatani perbedaan taraf perkembangan ekonomi di kawasan perkotaan dan non perkotaan, serta mengurangi disparitas antar kawasan.

Bagaimana progress dari rencana pembangunan Anjungan Cerdas, terutama di Trenggalek dan Bali?

Progress Anjungan Cerdas di Bendungan Tugu, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, dimana sedang dilakukan *land clearing*. Kemudian ekspose desain akan segera disampaikan kepada Bupati Trenggalek. Selanjutnya sudah dilaksanakan pembangunan direksi keet dan pagar keliling proyek. Untuk Anjungan Cerdas di Rambut Siwi Provinsi Bali sedang dilaksanakan *land clearing*. Selanjutnya telah dilakukan perbaikan tanah dasar dan penimbunan, pembuatan DED dan kelengkapan desain, dan pembangunan direksi keet dan pagar keliling proyek. Saat ini sedang diajukan surat perjanjian pinjam pakai lahan dan bangunan *ex rest area* antara pemerintah provinsi Bali dengan kementerian PUPR.

Mengapa dua daerah itu yang dipilih untuk pembangunan Anjungan Cerdas?

Pembangunan Anjungan Cerdas Bahari Rambut Siwi dan Bendungan Tugu sudah memenuhi kriteria yang dijadikan dasar atau parameter pemilihan lokasi terbaik seperti lokasinya terletak di pinggir jalan nasional. Lokasi ini memenuhi persyaratan geometarik jalan. Kemudian tidak berada di lokasi rawan bencana, berada di kawasan yang memiliki potensi lokal yang dapat dikembangkan, sesuai dengan fungsi tata ruang yakni RTRW dan RDTR, mendapatkan rekomendasi dari Dinas terkait, dan status kepemilikan tanah sudah dimiliki pemerintah pusat atau daerah. Dua lokasi ini mudah dalam pembebasan tanah atau *clean and clear*.

Ada daerah lain yang direncanakan akan dibangun Anjungan Cerdas?. Daerah mana saja?

Ada. Usulan rencana lokasi pembangunan Anjungan Cerdas lokasinya di Kecamatan Merek Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya berada di Labuan Bajo Kabupaten Ende Provinsi Nusa

Tenggara Timur. Selanjutnya di Makale Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan, dan Labuan Kayangan Kabupaten Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Langkah apa saja yang akan dilakukan terhadap rencana pengembangan Anjungan Cerdas daerah tersebut?

Untuk Anjungan Cerdas di Kecamatan Merek, pembebasan lahan sudah selesai dilaksanakan dan saat ini sebagian lahan sedang dilakukan tahap pembayaran. Sebagian lagi masih terkendala pemindahan posisi rencana lahan, sehingga masih dalam tahap negosiasi dan tahap pelepasan hak dan sedang disusun surat keputusan mengenai pelepasan hak atas tanah masyarakat. Metode yang akan digunakan dalam rencana pembangunan anjungan cerdas tersebut yakni *design and build*, yaitu pekerjaan perencanaan yang terintegrasi dengan pelaksanaan konstruksinya.

Program apa yang akan diselesaikan Pusat Pengembangan Kawasan Strategis hingga akhir tahun ini?

Beberapa program yang akan diselesaikan seperti persiapan pinjaman Bank Dunia pada program Pembangunan Infrastruktur Pariwisata Indonesia. Terkait hal itu Kementerian PUPR telah menghasilkan daftar program kebutuhan infrastruktur pada tiga destinasi pariwisata prioritas yakni Danau Toba, Mandalika dan Borobudur. Saat ini Kementerian PUPR dan Bank Dunia sedang melakukan proses diskusi untuk menseleksi program yang ada dengan menggunakan kriteria yang disusun oleh BPIW dibantu oleh Bank Dunia. Pada tanggal 4 oktober 2016, telah dilaksanakan focus group discussion atau FGD persiapan program *infrastructure for Tourism Project* membahas mengenai tipe pinjaman dalam bentuk *Investment Project Financing (IPF)* dan *Project for Result (PFR)* serta mekanismenya. Dibahas juga *TOR integrated Masterplan, Readiness Criteria* untuk PFR, serta hasil screening program 2017.

Apa harapannya dari program-program pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan sepanjang tahun ini ?

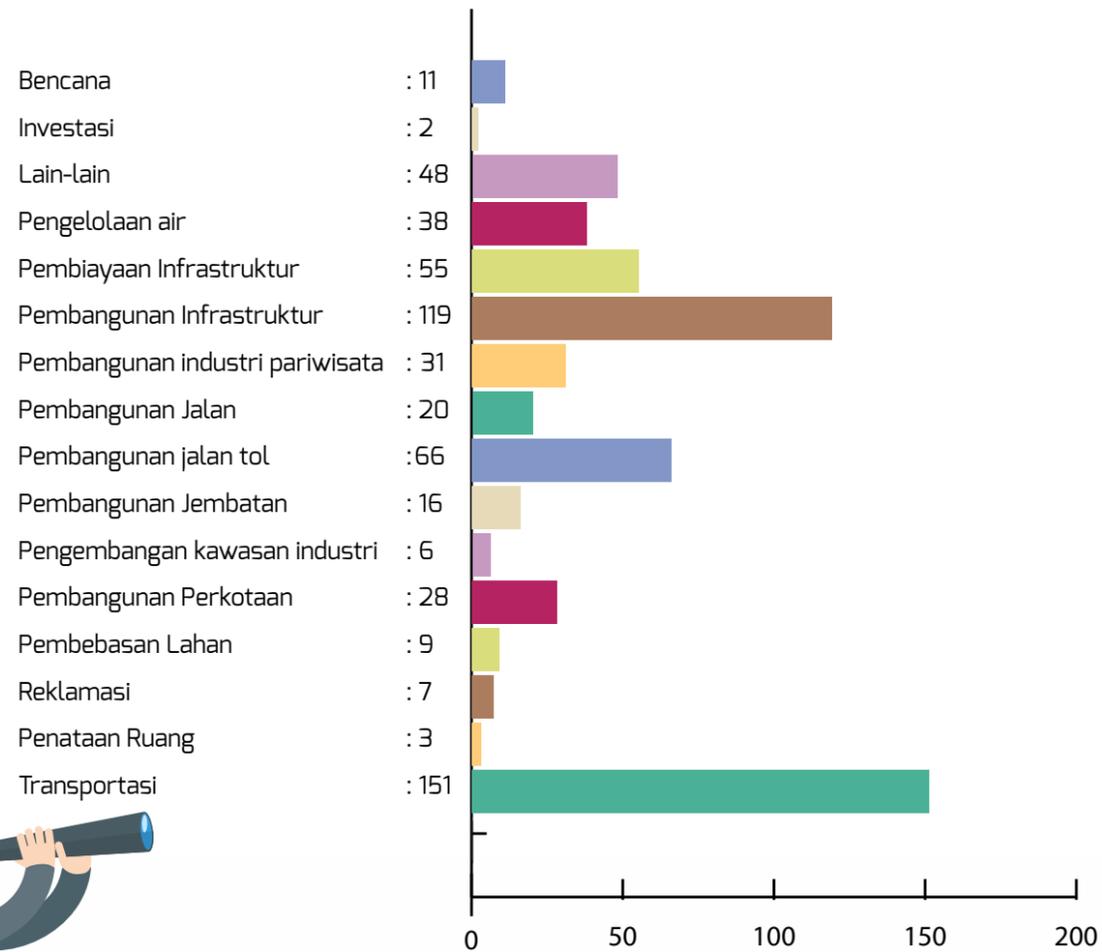
Dengan konsep pendekatan WPS, maka diharapkan terwujudnya keterpaduan perencanaan dan sinkronisasi program agar dapat terlaksana dengan baik dan bermanfaat dalam pengembangan wilayah, khususnya dalam mendukung pengembangan program kawasan strategis pariwisata nasional. **Tim Redaksi**



Beberapa program yang akan diselesaikan seperti persiapan pinjaman Bank Dunia pada program Pembangunan Infrastruktur Pariwisata Indonesia. Terkait hal itu Kementerian PUPR telah menghasilkan daftar program kebutuhan infrastruktur pada tiga destinasi pariwisata prioritas yakni Danau Toba, Mandalika dan Borobudur.

Infrastruktur PUPR Dalam Media Cetak

Kami membuat guntingan berita dengan topik infrastruktur dan topik lain yang berkaitan dengannya. Guntingan berita kami sarikan dari 7 media cetak, yaitu Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Koran SINDO, Investor Daily, Republika, dan Bisnis Indonesia. Dengan adanya guntingan berita ini, diharapkan dapat diketahui opini publik yang berkembang seputar infrastruktur. Selain itu, dapat berguna sebagai media monitoring BPIW. Berikut ini adalah rangkuman pemberitaan mengenai infrastruktur dan yang berkaitan. Selama bulan Oktober 2016. Total ada 541 berita dari 7 media periode 1 Oktober- 31 Oktober 2016.



Beberapa berita menarik selama bulan oktober:

- Media Indonesia** (halaman 18) Jumat, 14 Oktober 2016
PUPR Umumkan capaian program sejuta rumah
Kementerian PUPR mengumumkan realisasi program sejuta rumah hingga Oktober tahun 2016 telah mencapai lebih dari 400 ribu rumah di seluruh Indonesia
- Bisnis Indonesia** (Halaman 7) Kamis, 20 Oktober 2016
Proyek Tol Berjalan Tetap Melaju
Kementerian PUPR memastikan rencana pembuatan instruksi Presiden mengenai moratorium alih fungsi lahan tidak akan mengganggu proses pengadaan tanah untuk proyek infrastruktur jalan tol yang tengah berjalan.
- Bisnis Indonesia** (Halaman 7) Jumat, 21 Oktober 2016
PUPR Andalkan Anggaran Sendiri
Kementerian PUPR mempertimbangkan alokasi keperluan dana tambahan melalui anggaran sendiri
- Koran Tempo** (Halaman, 17) Kamis, 13 Oktober 2016
Jembatan Darurat Pangandaran rampung dua pekan
Kementerian PUPR tengah memperbaiki jembatan caputra pinggan pangandaran yang ambles
- Bisnis Indonesia** (Halaman, 7) Kamis, 13 Oktober 2016
Pembangunan Kota Maja Pesat
Kementerian PUPR mengungkapkan bahwa pembangunan kota mandiri baru Maja Lebak Banten mengalami kemajuan pesat
- Bisnis Indonesia** (Halaman 7) Selasa, 4 Oktober 2016
PUPR Ajukan proposal ke World Bank
Kementerian PUPR tengah ajukan proposal pengembangan tiga destinasi wisata prioritas Danau Toba Borobudur dan Mandalika
- Investor Daily** (Halaman, 18) Selasa, 4 Oktober 2016
2017, Anggaran Pembiayaan Perumahan Rp 15,6 T
Kementerian PUPR menyatakan anggaran pembiayaan perumahan pada tahun 2017 mencapai Rp 15,6 T
- Investor Daily** (Halaman, 6) Selasa, 25 Oktober 2016
2017, Anggaran PUPR Jadi Rp 101,5 Triliun, Kemenhub Rp 46 Triliun
Komisi V menyetujui anggaran PUPR Jadi Rp 101,5 Triliun, Kemenhub Rp 46 Triliun
- Investor Daily** (Halaman, 6) Sabtu-Minggu, 29-31 Oktober 2016
Pembangunan Infrastruktur Pariwisata Libatkan Bank Dunia
KemenPUPR melibatkan world bank untuk membangun infrastruktur pendukung pengembangan tiga lokasi wisata prioritas seperti yang ditetapkan Presiden Joko Widodo
- Koran Tempo** (Halaman, 8) Sabtu-Minggu, 29-31 Oktober 2016
Dana Abadi BUMN Disiapkan untuk Proyek Tol
Kementerian PUPR sedang menyiapkan skema pengelolaan dana abadi dari badan usaha milik negara untuk pembangunan jalan tol.

Kementerian PUPR Dukung Pembangunan Infrastruktur Kepulauan Riau melalui WPS 3 Batam - Tanjung Pinang

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerima kunjungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di Gedung BPIW, Jakarta, belum lama ini.

Dalam pertemuan dengan DPRD Provinsi Kepri, Kementerian PUPR melalui BPIW mendukung pengembangan infrastruktur di Provinsi Kepri. Sekretaris BPIW Kementerian PUPR, Dadang Rukmana mengatakan, saat ini Provinsi Kepri masuk dalam Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 3 Batam-Tanjung Pinang.

Menurutnya, pada WPS 3 terdapat potensi pengembangan kawasan industri dan pariwisata. "Yakni pengembangan Kawasan Kabil Industrial Park dan Kawasan Pariwisata

Kabil Industrial Park terdapat 32 perusahaan besar yang menempati kawasan seluas 287 hektare.

Dadang mengatakan, pengembangan kawasan industri diharapkan akan berdampak pada penyediaan lapangan kerja dan mengurangi tingkat kemiskinan warga sekitar. Kemudian, Kawasan Pariwisata Bintan juga didorong untuk berkembang. "Kalau kawasan pariwisata berkembang akan tercipta lapangan kerja di bidang industri pariwisata, sehingga diharapkan akan mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat sekitar," jelasnya.

Selain itu untuk periode 2015-2019 Kementerian PUPR telah melakukan beberapa perencanaan pembangunan infrastruktur PUPR di Kepri. Untuk sektor Cipta Karya, ungkap Dadang, antara lain pembangunan perumahan di beberapa

ULTIMATE KAWASAN PARIWISATA DAN MARITIM TANJUNG PINANG 2025



lokasi, pembangunan 35 rumah susun, bantuan rumah swadaya, peningkatan kualitas permukiman kumuh Batam-Bintan, pengembangan infrastruktur kawasan permukiman perkotaan, pengembangan infrastruktur drainase perkotaan, peningkatan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum,-red) di kawasan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), peningkatan SPAM di ibu kota kecamatan, peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh kawasan Sagulung, Bangkong, dan Nongsa.

Ada juga penanganan kawasan permukiman kumuh di Bintan, pembangunan drainase lingkungan pemukiman di Tanjung Pinang. "Serta optimalisasi SPAM di beberapa wilayah seperti SPAM Bintan, SPAM dan

Galang di Kota Batam" jelas Dadang.

Dadang menerangkan, untuk sektor Sumber Daya Air (SDA) antara lain seperti pembangunan pengaman pantai Karang Halen Mars di Kota Batam, pembangunan

Pengembangan kawasan industri diharapkan akan berdampak pada penyediaan lapangan kerja dan mengurangi tingkat kemiskinan warga sekitar.

beberapa bendungan seperti Bendungan Muara Sei Gong, pembangunan embung Kebun Raya Batam di Kota Batam. Selain itu, dilakukan pula pembangunan pengamanan pantai di beberapa wilayah lainnya seperti

pantai Pulau Nongsa, serta pembangunan drainase Tiban di Kota Batam.

Terkait sektor Bina Marga, lanjut Dadang, ada perencanaan pembangunan Jalan Tembesi-Tanjung Berikat, pembangunan Jalan Batu Aji - Tanjung Uncang, pembangunan fly over Kabil MYC, pembangunan fly over Jam MYC, pembangunan jembatan muara, dan pembangunan jalan dan jembatan di beberapa wilayah lainnya.

"Serta pembangunan Jalan Simpang Jam-Batu Ampar, pembangunan Jalan Lingkar Kota Tanjung Pinang-Kabupaten Bintan, pembangunan Jalan Tanjung Uban-Mengkulu Bantan Bayu- Gesek," ungkap Dadang.

BPIW Tinjau Pembangunan Anjungan Cerdas Rambut Siwi



Kunjungan BPIW ke lahan pembangunan Anjungan Cerdas Rambut Siwi

Sumber: Dok BPIW

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meninjau langsung pembangunan Anjungan Cerdas pada Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Gilimanuk-Denpasar-Padang Bai (Rambut Siwi) yang berlokasi di desa Yehembang Kangin, Kecamatan Mendoyo, Jembrana, Bali (7/10).

Kunjungan yang dilaksanakan bersamaan dengan acara penyusunan Standar Operasi Prosedur di lingkungan BPIW ini terlebih dahulu diawali dengan koordinasi bersama Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW.

Anjungan cerdas merupakan serangkaian bangunan yang terletak di tepi jalan nasional yang melayani pengguna jalan serta masyarakat lokal dengan fungsi informasi, promosi serta edukasi yang dilengkapi fasilitas penunjang.

Dalam kunjungan kerja terhadap salah

satu produk dari fungsi fasilitasi pengadaan tanah dan inkubasi BPIW ini, Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, BPIW, Hasna Widiastuti mengungkapkan Sekretariat BPIW dalam melaksanakan

Kunjungan yang dilaksanakan bersamaan dengan acara penyusunan Standar Operasi Prosedur di lingkungan BPIW ini terlebih dahulu diawali dengan koordinasi bersama Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW.

fungsi utamanya yaitu memberikan pelayanan terhadap internal organisasi BPIW, perlu juga mengenal produk-produk BPIW.

Kunjungan rombongan didampingi oleh Kepala Subbidang Wilayah I, Bidang Fasilitasi

Pengadaan Tanah, Johannes Tumpal Panjaitan serta tim konsultan pengawas PT. Virama Karya (Persero) dan tim konsultan pelaksana PT. Nindya Karya (Persero).

Tim konsultan PT. Nindya Karya Persero, Arum Sari Trihadiningsih memaparkan target item pekerjaan pembangunan Anjungan Cerdas Rambut Siwi sampai dengan Oktober 2016 adalah bangunan amphitheater, jalan dan drainase dan renovasi bangunan eksisting.

Untuk mengoptimalkan fungsi Anjungan Cerdas ini partisipasi dari pemerintah setempat dan tokoh masyarakat juga dilibatkan. Telah dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam perancangan kebutuhan dan fungsi dari anjungan ini. Anjungan Cerdas ini selain mengakomodasi aktivitas keagamaan di Pura Luhur Anjungan Cerdas ini juga akan mengakomodasi aktivitas budaya lokal (Mekepong). (bri/infoBPIW)

BPIW Sosialisasikan Penerapan e-HRM

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan sosialisasi Penerapan electronic-Human Resource Management (e-HRM) dan Konsinyasi Data Pegawai kepada seluruh unit kerja eselon III di lingkungan BPIW di Semarang, akhir pekan lalu.

Kepala Bagian Kepegawaian dan Ortala, Hasna Widiastuti mewakili Sekretaris BPIW saat membuka acara mengatakan, sosialisasi tersebut dilaksanakan sebagai bentuk dukungan BPIW terhadap pelaksanaan sistem e-HRM.

"e-HRM adalah inovasi baru sistem informasi Aparatur Sipil Negara (ASN,-red) yang dikembangkan Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal (Sekjen,-red) Kementerian PUPR. e-HRM ini merupakan pengembangan dari Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMKA) PUPR," papar Hasna.

Hasna menyampaikan bahwa BPIW menyambut baik pengembangan SIMKA PUPR menjadi e-HRM. "Pada e-HRM setiap pegawai diberikan kewenangan untuk memperbaharui data pribadi, namun ada kontrol yang berjenjang dan terstruktur yang dipantau dan dikoordinasikan oleh Biro Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana," ungkapnya.

Sosialisasi ini menjelaskan mengenai kebijakan pengelolaan pegawai melalui e-HRM dan pengelolaan aplikasi e-HRM serta pemutakhiran data PNS berdasarkan verifikasi terhadap Daftar Riwayat Hidup (DRH).

"Keberadaan e-HRM ini diharapkan dapat mewujudkan kelancaran administrasi dan pengelolaan data kepegawaian di lingkungan Kementerian PUPR, serta mendukung program Reformasi Birokrasi Kementerian

PUPR" lanjut Hasna.

Sementara itu, Kepala Bagian Informasi Kepegawaian dan Umum, Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Sekjen Kementerian PUPR, Dedy Ekawinata menjelaskan, data e-HRM merupakan data

dan verifikator dapat memantau proses manajemen pegawai. Pegawai pun akan ikut bertanggung jawab atas datanya dengan melakukan perubahan mandiri bila ada kesalahan atau kekurangan data" jelasnya.

Dalam e-HRM terdapat beberapa fitur,



Sumber: Dok BPIW

ASN Kementerian PUPR yang akan dijadikan dasar untuk melakukan sinkronisasi ke database nasional yaitu Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Cakupan data e-HRM meliputi data PNS dan data Non PNS, setiap proses tersimpan di database e-HRM. Bagi PNS, data yang tersimpan berawal dari CPNS hingga pensiun, sedangkan untuk Non PNS mencakup data mulai bekerja hingga berhenti" ujar Dedy.

la memaparkan tujuan dari penerapan e-HRM tersebut antara lain, tersedianya data utama kepegawaian Kementerian PUPR dan memberikan fasilitas pemantau proses manajemen pegawai kepada seluruh pegawai Kementerian PUPR.

"Jadi dengan adanya e-HRM ini pegawai

antara lain input serta update data pegawai, keluarga serta riwayat hidup, alert sistem, monitoring proses, informasi kepegawaian, arsip digital, agenda kerja dan berita kepegawaian.

la menambahkan, fitur-fitur e-HRM akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan manajemen pegawai. Dalam sosialisasi ini dilakukan praktek tata cara pengisian e-HRM yang didampingi Kepala Subbagian Data dan Informasi, Bagian Informasi Kepegawaian dan Umum Biro Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Sekjen Kementerian PUPR, Eriswan Nur. (bri/infoBPIW)

BPIW Dukung Pengembangan Infrastruktur di Ternate

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) mendukung pengembangan infrastruktur di Kota Ternate, Maluku Utara. Hal itu diungkapkan Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan saat menerima kunjungan kerja Walikota Ternate, Burhan Abdurahman di kantor BPIW Kementerian PUPR di Jakarta, Selasa (25/10).

"Pengembangan infrastruktur di Kota Ternate perlu dilakukan dengan perencanaan khusus, mengingat Ternate merupakan salah satu kota yang memiliki nilai sejarah tinggi di negeri ini" ungkap Rido yang didampingi Sekretaris BPIW, Dadang Rukmana serta jajaran pejabat BPIW lainnya.

Artinya, ujar Rido, pengembangan infrastruktur yang dilaksanakan harus dapat memperkuat karakter Kota Ternate sebagai kota bersejarah. "Jangan sampai pengembangan infrastruktur yang dilakukan, akhirnya menghilangkan makna Ternate sebagai kota bersejarah," tegasnya.

Ia juga menyatakan, kondisi Kota Ternate saat ini sudah semakin padat, sehingga perlu melakukan pengembangan wilayah dan infrastruktur ke pulau sekitarnya, sebagai solusi dari keterbatasan lahan di Pulau Ternate. "Kementerian PUPR kini telah melakukan studi kelayakan untuk pembangunan jembatan yang menghubungkan antara Pulau Ternate, Pulau Maitara dan Pulau Tidore," jelas Rido.

Selain itu, Rido juga mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate untuk terus meningkatkan gerakan Barifola, yakni gerakan gotong royong membangun rumah atau bedah rumah milik masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tak menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, tradisi di Kota Ternate tersebut yang bagus, sehingga perlu dipertahankan dan tingkatkan.

Pada kesempatan yang sama, Dadang Rukmana mengatakan, saat ini Kementerian



Kepala BPIW, Rido Matari saat menerima kunjungan Walikota Ternate

Sumber: Dok. BPIW

PUPR melakukan pengembangan infrastruktur di Indonesia menggunakan pendekatan yang berbasis wilayah atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). "Seluruh wilayah di Indonesia dikelompokkan ke dalam 35 WPS. Ternate sendiri masuk ke dalam WPS 29, yakni Ternate-Sofifi-Daruba," jelasnya.

Dengan pendekatan WPS ini, lanjutnya, diharapkan pengembangan infrastruktur PUPR dapat dijalankan secara terpadu dan komprehensif. "Perlu diakui jika sebelumnya, penanganan terhadap kota sejarah dilakukan belum terpadu, misalnya pemugaran pada bangunan-bangunan tertentu. Sehingga, penanganan yang dilakukan tersebut justru menghilangkan makna sejarahnya," papar Dadang.

Dengan begitu, lanjutnya, saat ini BPIW berupaya mendorong pengembangan wilayah dan pembangunan infrastruktur sesuai konteksnya secara terpadu dan

komprehensif. "Perencanaannya dilakukan secara terpadu dan komprehensif, agar penanganan yang dilakukan benar-benar sesuai tujuan dan harapan," jelasnya.

Sementara itu, Burhan Abdurahman

Pengembangan infrastruktur yang dilaksanakan harus dapat memperkuat karakter Kota Ternate sebagai kota bersejarah. "Jangan sampai pengembangan infrastruktur yang dilakukan, tetapi menghilangkan makna Ternate sebagai kota bersejarah."

menyampaikan, Ternate sangat potensial untuk dikembangkan sebagai kota pusaka dunia. Pasalnya, banyak peninggalan bangunan bersejarah di Kota Ternate. "Untuk mengembangkan menjadi kota pusaka dunia,

tertentu perlu bantuan berbagai pihak, salah satunya bantuan dari pemerintah pusat," terangnya.

Ia juga mengatakan, Pemkot Ternate terus memperjuangkan pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Ternate, Pulau Maitara dan Pulau Tidore. Hal itu untuk kemudahan mobilitas ekonomi dan sosial masyarakat antar ketiga pulau yang berdekatan itu. Menurutnya, pembangunan jembatan tersebut membutuhkan dana besar, sehingga dukungan berbagai pihak sangat ditunggu.

Terkait gerakan membangun rumah atau bedah rumah Barifola, lanjutnya, Pemkot Ternate bertekad untuk terus meningkatkannya. "Saat ini pola Barifola telah berhasil membangun sebanyak 174 rumah warga. Ke depan semoga dapat lebih banyak lagi rumah yang dibangun," harapnya. (ris/infoBPIW)

Pacu Pengembangan Kawasan Danau Toba, Kementerian PUPR Targetkan Akses Menuju Bandara Sibisa Dibangun Tahun 2017



Pemandangan Danau Toba di Sore Hari

Sumber: Dok. BPIW

Kementerian PUPR terus memacu pengembangan kawasan pariwisata Danau Toba. Salah satu yang dilakukan adalah membangun akses menuju Bandara Sibisa. Ditargetkan, 2017 mendatang rekonstruksi jalan akses bandara tersebut dapat terealisasi.

Bandara ini terletak di Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, dan terletak 10 kilometer dari Kota Parapat, Danau Toba. Sedangkan untuk saat ini masih dalam tahap trace jalan dan pembebasan lahan. Selain itu masih dilakukan penyusunan Detail Engineering Design (DED).

Demikian disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan saat mengunjungi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba, selama 2 hari, (16-17/10).

Lebih lanjut Rido mengatakan, kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka menjangkau kawasan sekitar KSPN Danau Toba, kita akan

dapat menjangkau pendapat kepala daerah dan masyarakat terkait perkembangan dan rencana dukungan infrastruktur PUPR ke depannya," ungkap Rido.

Kunjungan pertama diawali dengan meninjau Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, untuk melihat kondisi eksisting infrastruktur PUPR. Pasalnya, Kecamatan Muara merupakan salah satu kawasan terpilih dari pengembangan destinasi wisata Danau Toba. Dalam kunjungan ini, rombongan BPIW disambut Bupati Tapanuli Utara, Drs. Nikson Nababan beserta jajarannya.

Kemudian, rombongan melihat kondisi eksisting di Balige. Di sana akan dilakukan penataan kawasan dengan merencanakan jalan bypass yang menghubungkan antara jalan nasional dan jalan kabupaten sepanjang 10,1 km.

Selanjutnya kunjungan dilanjutkan ke Kecamatan Simanindo, Kecamatan Ambarita, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Rido dan jajaran pimpinan BPIW lainnya disambut Bupati Samosir, Rapidin Simbolon dan beberapa jajaran Pemkab setempat.

Kecamatan Ambarita akan dilakukan revitalisasi pelabuhan Ambarita dengan menambahkan pembangunan dermaga yang diharapkan dapat mengurangi kepadatan pelabuhan Tomok.

Tim BPIW juga mengunjungi lokasi Penetapan Tele, sebagai salah satu obyek atraksi wisata Danau Toba yang dilanjutkan menuju lokasi survei terakhir yaitu Kecamatan Merek, Kabupaten Karo yang merupakan rencana lokasi untuk pembangunan Anjungan Cerdas.

Kunjungan itu dilakukan secara maraton ke Tapanuli Utara, Toba Samosir, Simalungun, Samosir, Humbang Hasundutan, Dairi, Karo dan Merek. Saat berada di Kabupaten Humbang Hasundutan, rombongan disambut Bupati Humbang Hasundutan, Banjarmasin dan beberapa stafnya.

Turut serta dalam kunjungan tersebut, yakni Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis BPIW, Rezeki Peranginangin beserta jajaran pejabat BPIW lainnya. (Doris/infoBPIW)

BPIW Pacu Percepatan Pengembangan Kota Baru Maja

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus memacu percepatan pengembangan Kota Baru Publik Maja.

"Guna mendorong percepatan para stakeholder melaksanakan komitmen sesuai nota kesepakatan yang telah ditandatangani, akan dibentuk forum monitoring pelaksanaan yang terdiri dari seluruh elemen stakeholder," ungkap Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan saat meninjau langsung perkembangan Kota Baru Publik Maja di Ruang Rapat Citra Land Kabupaten Lebak, Banten, Selasa (4/10).

Menurutnya, forum monitoring tersebut dapat bekerja untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pengembangan Kota Baru Publik Maja. Kemudian, lanjut Rido, forum tersebut dapat menetapkan target pelaksanaan program percepatan pembangunan infrastruktur Kota Baru Publik Maja.

Lebih lanjut, Rido menyatakan, setiap pengembang biasanya menciptakan center

pengembangan dengan membangun mall, taman, restoran, dan fasilitas lainnya. "Diharapkan center pengembangan itu dapat dibangun secara sinergi oleh para pengembang pada satu lokasi tertentu. Kalau center pengembangan dapat tersinergi akan berdampak pada percepatan pengembangan itu sendiri," papar Rido.

Menurutnya, pengembangan Kota Baru Publik Maja akan membutuhkan air baku yang cukup banyak, sehingga pembangunan waduk akan didorong untuk dapat dilakukan percepatan agar dapat memenuhi kebutuhannya. "Kemudian pendirian rumah untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah,-red) perlu menjadi prioritas dalam pengembangan ini," tegas Rido.

Ia berharap, Kota Baru Publik Maja dapat cepat berkembang dan menjadi kota baru mandiri sebagai penyangga ibu kota negara. Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW Kementerian PUPR, Agusta mengatakan, Kota Baru Publik Maja berada diantara dua Wilayah Pengembangan Strategis (WPS),

yakni WPS 7 meliputi Jakarta-Bogor-Ciawi-Sukabumi serta WPS 9 meliputi Tanjung Lesung-Sukabumi-Pangandaran-Cilacap.

Agusta menjelaskan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengamanahkan terwujudnya 10 Kota Baru Publik, sehingga pengembangan Maja merupakan satu dari 10 kota yang diamanatkan. Saat ini telah ada ultimate program Kementerian PUPR dalam mendukung pengembangan Kota Baru Publik Maja, seperti pembangunan Waduk Sindangheula dan Waduk Karian, Jalan Tol Serang-Panimbang, Jalan Tol Serpong-Balaraja, pembangunan jalan Pamulang.

Pada kunjungan tersebut, hadir para perwakilan dari stakeholder, mulai dari BPIW Kementerian PUPR serta perwakilan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, Ditjen Sumber Daya Air (SDA), Pemprov Jabar, Pemprov Banten, Pemkab Bogor, Pemkab Lebak, Pemkab Tangerang, Pemkot Tangerang Selatan serta perwakilan para pengembang. (infobpiw)



Kepala BPIW, Rido Matari berdiskusi dengan Salah Satu Pengembang di Kota Baru Maja

Sumber: Dok. BPIW

Tema Hari Habitat Dunia: Perumahan Penggerak Kota Berkelanjutan

Hari Habitat Dunia (HHD) diperingati setiap Senin pertama Bulan Oktober. Pada tahun ini diperingati pada tanggal 3 Oktober. Peringatan HHD di Indonesia mengambil tema "Perumahan, Penggerak Kota Berkelanjutan". Sementara tingkat dunia mengangkat tema "Housing at The Centre".

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rido Matari Ichwan mengatakan tema tersebut mengandung pesan, bahwa pembangunan perumahan harus memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan, yaitu sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan.

"Pembangunan perumahan tidak bisa

dilakukan secara eksklusif, tapi harus terintegrasi dalam sistem pembangunan perumahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah,"

ujar Rido saat menjadi narasumber dalam talkshow "Bincang Kita" di Kompas TV yang mengangkat tema "Peringatan Hari Habitat Dunia 2016", Senin pagi (3/10). Pada acara tersebut hadir juga sebagai narasumber Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdhan Pomanto.



Kepala BPIW, Rido Matari menyampaikan Pembangunan Perumahan yang Berkelanjutan

Urban, yakni forum multi stakeholder yang diselenggarakan Pemerintah Republik Indonesia bekerjasama dengan The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) dan United Nations Habitat (UN Habitat).

"Kemudian, Asia Pacific Urban Forum for

yang lebih baik," papar Rido.

Sejak 2014 menurut Rido Indonesia menjadi mitra terdepan PBB dalam proses menuju Konferensi Habitat III. "Indonesia menjadi Anggota Biro Prepcom 3 dan menjadi lead country (pimpinan negara-red) untuk menjaring masukan dalam penyusunan Draft New Urban Agenda di Kawasan Asia Pasifik," terang Rido.

Selain itu, Indonesia pada Oktober 2015 menjadi tuan rumah tiga pertemuan penting dalam menuju Habitat 3, yakni Asia Pacific

Youth, forum perkotaan untuk kelompok pemuda di Asia Pasifik. Ada juga High Level Asia Pacific Regional Meeting for Habitat III, forum yang menjaring masukan dari negara-negara Asia Pasifik," terang Rido.

Selanjutnya, Indonesia aktif dalam pertemuan-pertemuan internasional sejak Bulan April, Mei, Juni, Juli dan September, termasuk menggelar Preparatory Committee (Prepcom) 3 pada 25-27 Juli 2016 di Surabaya.

"Acara di Surabaya yang dihadiri 193 negara, bertujuan untuk mempersiapkan isu perkotaan atau Zero Draft New Urban Agenda (ZD NUA) yang akan dibawa untuk dibahas dan diratifikasi dalam pembahasan Agenda Baru Perkotaan untuk dunia," jelas Rido.

Menurutnya, beberapa kontribusi Indonesia pada draf tersebut terkait penekanan pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil, peran komunitas lokal, peran pemangku kepentingan dan pembiayaan perumahan. "Dalam pembangunan perlu ada peran aktif masyarakat lokal dan bantuan pembiayaan dari dunia internasional untuk menciptakan permukiman layak huni bagi masyarakat segala lapisan," paparnya.

Dengan demikian menurut Rido, Indonesia memiliki peran penting dalam Konferensi Habitat 3 yang akan digelar Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) di Quito, Ekuador pada 17-20 Oktober 2016 mendatang. Patalnya, Draft New Urban Agenda (Draf Agenda Baru Perkotaan) yang akan dibahas dalam konferensi Habitat 3 digagas pada

Preparatory Committee (Prepcom) 3 pada 25-27 Juli lalu di Surabaya.

Sementara itu, Wali Kota Makassar, M. Ramdhan Pomanto menuturkan bahwa Pemerintah Kota Makassar telah berinovasi dalam hal pemukiman masyarakat, yakni dengan membuat apartemen lorong. "Bangunan itu tanpa pondasi dan bisa dibongkar pasang, jadi tidak terlalu menyulitkan. Inovasi tersebut merupakan

Beberapa kontribusi Indonesia pada draf tersebut terkait penekanan pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil, peran komunitas lokal, peran pemangku kepentingan dan pembiayaan perumahan. "Dalam pembangunan perlu ada peran aktif masyarakat lokal dan bantuan pembiayaan dari dunia internasional untuk menciptakan permukiman layak huni

solusi mengatasi persoalan pengadaan rumah miskin serta penataan pemukiman kumuh. Pembangunan tersebut dilakukan bertahap sampai 2019,"ungkap Ramdhan.

Ia yakin, pembangunan apartemen lorong akan menjadi solusi untuk menangani masalah pemukiman kumuh di lorong-lorong dengan konsep dapat dibongkar pasang. Selain itu, bangunan tersebut akan menjadi rumah ramah lingkungan bagi warga kurang mampu. Ramdhan berharap, pemerintah pusat dapat mendukung sehingga dapat mempercepat terwujudnya pembangunan apartemen lorong di seluruh Makassar. **(ris/infoBPIW)**

BPIW - UNISBA Jajaki Kerja Sama Dalam Pengembangan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota



Sumber: Dok BPIW

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR dan Universitas Islam Bandung (Unisba) jajaki peluang kerja sama, terutama dalam hal pengembangan ahli perencanaan wilayah dan kota.

Peluang kerja sama ini terbuka lebar mengingat Unisba memiliki Program Studi (Prodi) Pasca Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK). Sementara BPIW membutuhkan ahli di bidang tersebut.

Demikian yang terungkap dalam diskusi Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan dengan Kepala Prodi Pasca Sarjana PWK Unisba, Dr. Ernawati dan jajarannya, saat berkunjung ke kantor BPIW, Jakarta, Selasa (25/10). Dalam kesempatan itu Rido meyakini, ke depan akan banyak hal yang dapat disinergikan dari BPIW dan Prodi Pasca Sarjana PWK Unisba.

Lebih lanjut Rido menyatakan, dalam melakukan perencanaan pengembangan infrastruktur memang perlu melibatkan banyak pihak. "Salah satunya keterlibatan kalangan akademis atau perguruan tinggi,"

ujarnya. Untuk itu, BPIW senantiasa terbuka melakukan kerja sama dengan berbagai kalangan.

Dalam kesempatan tersebut Rido juga mengapresiasi Unisba yang membuka Prodi Pasca Sarjana PWK. Terlebih, saat ini keberadaan ahli perencanaan kawasan dan kota di Indonesia masih relatif kurang. "Hadirnya Prodi Pasca Sarjana PWK Unisba, diharapkan dapat berkontribusi dalam pemenuhan ahli perencanaan wilayah dan kota, sehingga keberadaan kota-kota dan wilayah di negeri ini dapat semakin tertata lebih baik," papar Rido.

Sementara itu, Kepala Prodi Pasca Sarjana PWK Unisba, Ernawati mengatakan, kunjungan ini dilakukan untuk mempererat hubungan dan membuka peluang kerja sama di masa depan. Terlebih, saat ini Unisba merupakan kampus pertama yang membuka Prodi Pasca Sarjana PWK di Kota Bandung, Jawa Barat.

Ia berharap, ke depan akan ada kerja sama kedua belah pihak, mulai dari kesempatan magang untuk mahasiswa pasca sarjana

di BPIW, melakukan kajian bersama, seminar, simposium dan lainnya. "Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan komitmen bersama untuk menciptakan wilayah dan perkotaan di Indonesia yang lebih baik," jelasnya. Kendati baru pertama dibuka, Ernawati mengungkapkan, peminat terhadap Pasca Sarjana PWK Unisba cukup banyak. "Penerimaan mahasiswanya telah memenuhi target yang ditetapkan, yakni melebihi dari 100 mahasiswa," ungkap Ernawati.

Dalam kunjungan tersebut, Ernawati didampingi Tim Prodi Pasca Sarjana PWK Unisba yakni, Dr Hilwati dan Dr Poernomosidhi. Sedangkan yang turut hadir dari BPIW yakni Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, Harris.H.Batubara dan Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur I, Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, Benny Hermawan. (ris/infoBPIW)

BPIW Targetkan Lelang Dini Dimulai Bulan November

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR saat ini mulai mempersiapkan lelang dini untuk 28 paket kegiatan kontraktual tahun anggaran 2017. Drencanakan lelang pertama akan dilaksanakan bulan depan, yakni November 2016. Kemudian dilanjutkan dengan lelang kedua pada Desember 2016 mendatang. Ditargetkan penandatanganan kontrak akan mulai dilaksanakan mulai Januari 2017 mendatang.

Persiapan lelang dini tersebut dibicarakan lebih lanjut saat Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan di Lingkungan BPIW, yang diikuti seluruh pejabat, Jumat (21/10).

Sehubungan dengan hal itu, Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan paket kegiatan yang disiapkan BPIW sudah menunjukkan money follow program. Ia berharap tahapan pelelangan dapat dijalankan dengan baik, sehingga sesuai jadwal yang telah ditetapkan. "Menegenai penajaman program kegiatan sudah sesuai amanat dari Bapak Menteri," tuturnya.

Rido berharap semua bagian dari organisasi BPIW, dapat mempersiapkan lelang dengan baik dan dapat disesuaikan dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kalaupun anggaran harus dipangkas pemerintah, Rido menegaskan hal itu tidak mengurangi semangat BPIW untuk melaksanakan tugas yang diberikan. "Pekerjaan kita sendiri sudah sangat menantang, dan sudah sangat membutuhkan perhatian semua unsur di BPIW," ucapnya.

Ia juga meminta program kegiatan seluruh pusat dapat saling bersinergi terutama dalam mendukung program prioritas nasional, salah satunya 10 prioritas Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). "Jadi kalau ada aktivitas kuat di bidang pariwisata, tentunya semua unit BPIW harus memikirkan

itu agar program pariwisata berjalan baik. Artinya semua itu bisa disiapkan" tegasnya.

Ditempat yang sama, Sekretaris BPIW, Dadang Rukmana menambahkan dalam melaksanakan lelang, beberapa persiapan yang dilakukan yakni SK penetapan Pokja, persiapan dokumen lelang seperti Kerangka

hal seperti program layanan teknis terkait sinkronisasi program jangka pendek dan tahunan keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR dan informasi keterpaduan antara pengembangan kawasan dan infrastruktur PUPR.



Kepala BPIW, Rido Matari memimpin rapat bersama Kepala Pusat di BPIW

Sumber: Dok BPIW

Acuan Kerja (KAK), Rencana lelang, readiness criteria, dan lain-lain.

Dalam acara itu, masing-masing pusat memberikan paparannya mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan dan akan direncanakan tahun 2017. Kepala Perencanaan Infrastruktur PUPR BPIW, Hadi Sucahyono menyampaikan beberapa kegiatan yang telah dilakukan. Beberapa diantaranya adalah Rencana induk pulau/kepulauan, baik di Pulau Sumatera, Jawa Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua dan pengembangan infrastruktur kawasan Perbatasan.

Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, Harris.H.Batubara menyampaikan beberapa

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, Rezeki Peranginangin memaparkan beberapa hal, diantaranya mengenai rencana pembangunan terpadu infrastruktur PUPR wilayah pertumbuhan strategis / kawasan strategis dan anjungan cerdas.

Sedangkan Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Agusta Ersada Sinulingga menjelaskan mengenai program yang telah dan masih dijalankan seperti pengembangan Kota Baru Maja, pengembangan Metropolitan Baru, dan program dukungan terhadap pengembangan kawasan perdesaan. (Hen/INFOBPIW)

BPIW Finalisasi *Masterplan dan Development Plan*

Pengembangan Empat Kawasan Perkotaan dan Tiga Kota Baru

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan melakukan finalisasi penyusunan masterplan dan development plan untuk pengembangan infrastruktur PUPR di empat kawasan perkotaan yaitu Cirebon dan sekitarnya, Cilacap dan sekitarnya, Pontianak dan sekitarnya, serta Bandar Lampung dan sekitarnya, sedangkan tiga kota baru yaitu kota baru Sofifi, kota baru Maja serta kota baru Bandar Kayangan.

Hal itu terungkap dalam seminar finalisasi penyusunan masterplan dan development plan yang digelar Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan di Bali, akhir pekan lalu. Seminar tersebut merupakan koordinasi

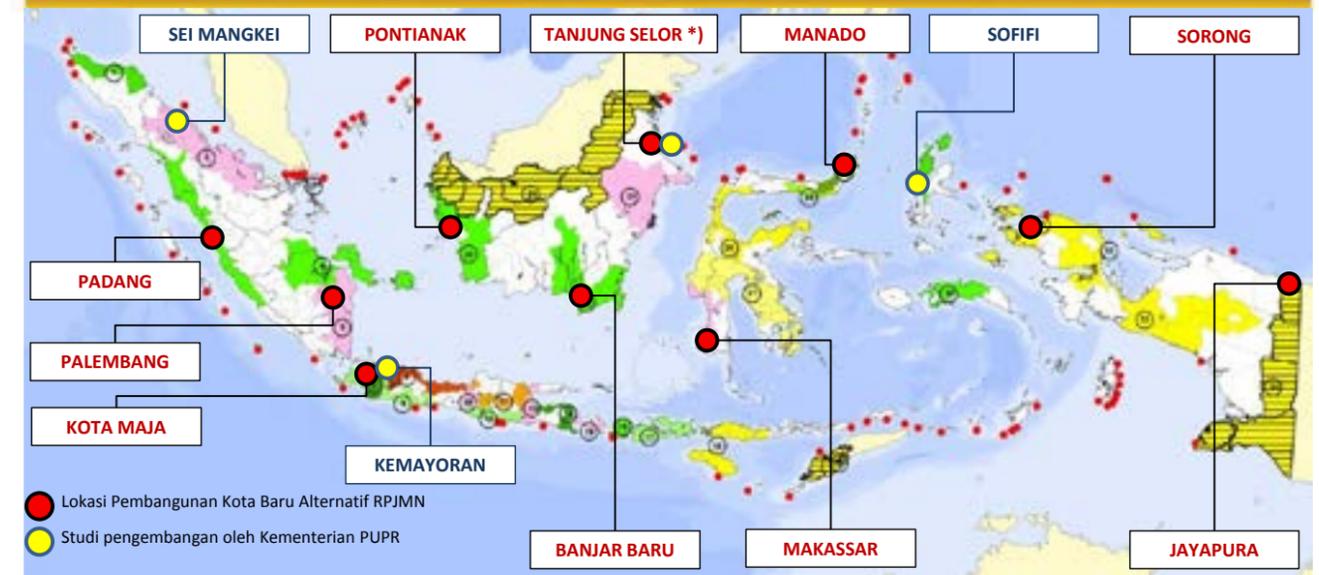
yang melibatkan Kementerian PUPR, tim perumus, pemerintah daerah, akademisi, pakar dan kementerian lembaga terkait.

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Agusta Ersada Sinulingga mengatakan, seluruh rencana pembangunan infrastruktur perkotaan harus memegang prinsip Cerdas Berkelanjutan.

"Pembangunan perkotaan harus berpedoman pada prinsip Cerdas Berkelanjutan. Cerdas untuk mengalokasikan pembangunan secara efektif, efisien, serta dapat menjawab kebutuhan masyarakat dalam era teknologi. Kemudian, berkelanjutan dalam mewujudkan kawasan yang nyaman, layak huni saat ini dan dimasa yang akan datang," terang Agusta.

Di tempat yang sama, Kepala Bidang Kota

Keterpaduan Terhadap Pengembangan Kota Baru 2015-2019



Terdapat **10** Lokasi Pengembangan Kota Baru Alternatif dalam RPJMN 2015-2019

Besar dan Kota Baru, Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW, Manggas Rudy Siahaan mengatakan, masterplan dan development plan yang telah disusun tim BPIW harus dapat dipertanggungjawabkan karena telah melalui tahapan identifikasi, analisis, serta koordinasi lintas sektor, baik level pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat khususnya satminkal di Kementerian PUPR.

Tim penanggap dan pakar, Son Damar menjelaskan, keberhasilan pembangunan kawasan kota baru adalah komitmen kuat dan kerjasama yang baik antar lintas sektor dan kementerian. "Komitmen kuat

dimaksudkan agar semua pihak dapat bersinergi dan mendukung, baik dalam aspek pembangunan infrastruktur, serta

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Agusta Ersada Sinulingga mengatakan, seluruh rencana pembangunan infrastruktur perkotaan harus memegang prinsip Cerdas Berkelanjutan.

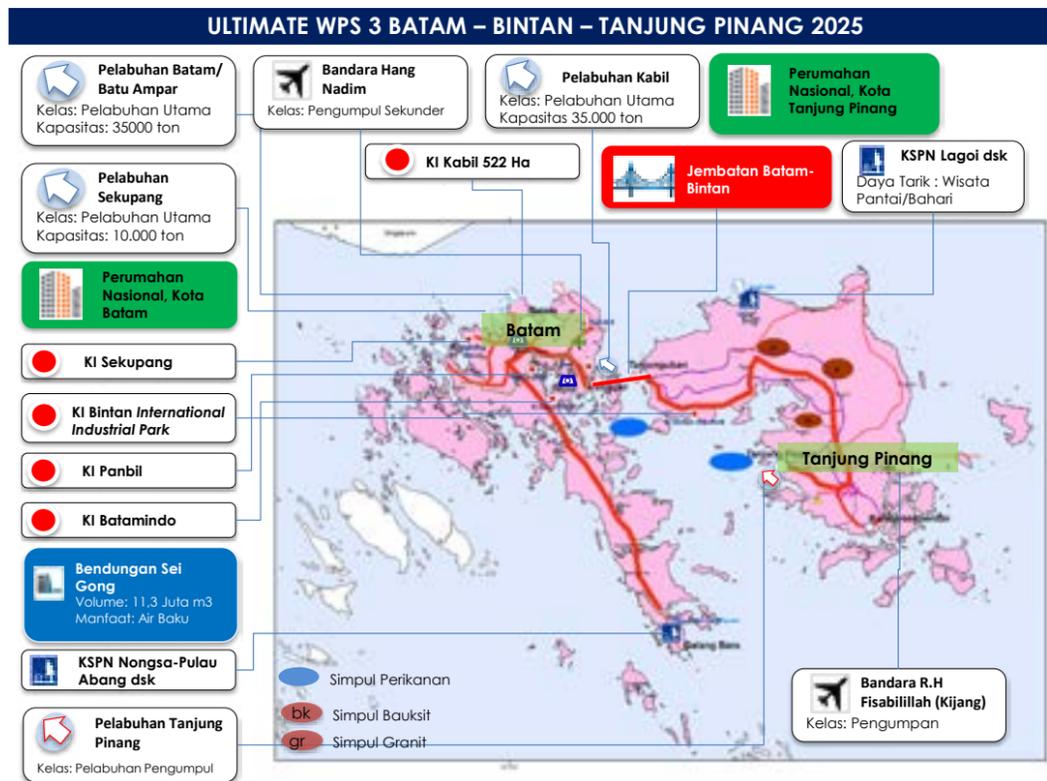
proses administrasi dalam pengembangan kota baru," jelasnya.

Pengembangan kota baru, lanjutnya, perlu mendapat dukungan seluruh pihak. "Sebagai contoh Bandar Kayangan, membutuhkan kerjasama dari Kementerian Perhubungan

dan Perindustrian untuk dapat mewujudkan pembangunan pelabuhan dan kawasan industri," paparnya.

Mantan Staf Ahli Kementerian PPN/Bappenas Bidang Tata Ruang dan Kemaritiman ini menjelaskan, mengembangkan kota baru juga memerlukan payung hukum yang kuat agar dapat merangkul seluruh kementerian. "Koordinasi dan kerjasama dari seluruh stakeholder perlu dilakukan, untuk mewujudkan pengembangan perkotaan ke arah cerdas dan berkelanjutan. Sebab, kawasan perkotaan selalu tumbuh setiap waktu, sehingga perlu dilakukan evaluasi dan monitoring secara kontinyu," paparnya. (miqdam/infoBPIW)

BPIW Dorong Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Laut di Batam - Bintan



Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong pengembangan infrastruktur di Pulau Batam dan Bintan. Letak geografis dua wilayah tersebut dikelilingi lautan, sehingga konektivitas laut perlu dikembangkan dalam menghubungkan antar pulau di kawasan itu.

Demikian diungkapkan Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW Kementerian PUPR, Rezeki Peranginangin saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Aksi Tahunan Implementasi Keterpaduan Program Kawasan Strategis Wilayah, di Batam, akhir pekan lalu.

Rezeki juga mengatakan arah pengembangan infrastruktur PUPR yakni, meningkatkan keterpaduan pengembangan infrastruktur. Kemudian, mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi. "Selain itu kita mengembangkan jaringan jalan, serta mendukung pengembangan perumahan dan kawasan perkotaan," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Rezeki juga menyinggung masalah pemrograman. Menurutnya pemrograman itu bersifat dinamis, sehingga bila ada kawasan yang

belum ada masterplannya, maka akan dibuatkan Quick Assessment. Sedangkan menyangkut rencana pembangunan, diakuinya setiap sektor punya rencana pembangunan masing-masing. Untuk itu ia berharap, semua pembangunan yang dibuat oleh masing-masing sektor dapat dipadukan dan Kementerian PUPR akan mendukung keterpaduan tersebut.

Sementara itu, salah satu pembicara dari Perwakilan Kementerian Perindustrian, Fransisca menjelaskan, pengembangan kawasan industri saat ini diarahkan ke luar Pulau Jawa, dikarenakan pulau Jawa sudah padat penduduk. "Untuk kawasan industri di pulau Jawa sendiri, diarahkan terkait teknologinya saja," jelasnya.

Sedangkan pembicara yang lain, Perwakilan Badan Koordinasi Penanaman Modal, Gatot Subiati mengatakan, saat ini para investor sangat berminat pada beberapa program, seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) serta technopark. Menurutnya, program-program tersebut sudah memiliki kejelasan mengenai kawasan dan lokasi pengembangannya. Dengan demikian, semua sektor dapat mendukungnya.

Koordinator Dukungan Pengembangan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Wilayah Barat, Bambang Wijanarko yang juga menjadi pembicara mengatakan, sesuai Nawacita terdapat 4 poin utama, yakni membangun Indonesia dari pinggir, meningkatkan kualitas hidup manusia, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, dan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

"Pengembangan KEK diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena akan melibatkan masyarakat. Target nasional KEK 2015-2019, sudah ada 2 KEK baru yaitu Tanjung Kelayang dan Sorong," paparnya.

Hadir dalam FGD ini, Perwakilan Kementerian Perindustrian, Fransisca, Perwakilan Badan Koordinasi Penanaman Modal, Koordinator Dukungan Pengembangan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Wilayah Barat, Perwakilan Subdit Pengembangan Pelabuhan, Kementerian Perhubungan, Perwakilan Biro Perencanaan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Akademisi. (ponky/infoBPIW)

Pemkab dan Aparat Desa Didorong Berperan Pro Aktif Dalam Pengembangan KPPN Praya



Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Kecil dan Perdesaan menggelar *Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Masterplan dan Pra Detailed Engineering Design (DED) Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Praya* di Selong, Lombok Tengah, beberapa waktu lalu.

Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Kecil dan Perdesaan, BPIW Kementerian PUPR, Sanusi Sitorus dalam sambutannya menekankan, pelaksana utama pengembangan KPPN Praya adalah pemerintah daerah dan aparat Desa Praya sendiri, sehingga diperlukan kemauan keras dan inovasi dari pemerintah daerah untuk dapat melakukan percepatan pengembangan KPPN Praya.

Dengan begitu, Sanusi berharap, pemangku kepentingan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur dapat lebih pro aktif menyampaikan masukan dalam finalisasi masterplan dan pra DED dalam pengembangan KPPN Praya. "Kegiatan ini sebagai pertemuan final. Kemudian hasil dari pertemuan akan kami bawa ke pusat untuk dikoordinasikan antar kementerian/lembaga terkait," terangnya.

Menurutnya, konsep yang diusung dalam masterplan KPPN Praya adalah untuk meningkatkan nilai jual dari potensi yang ada di Desa Praya.

Di tempat yang sama, Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur, Akhmad Dewanto menerangkan, Lombok Timur merupakan kawasan indikator dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). "Dapat dikatakan keberadaan Lombok Timur itu mewarnai

Provinsi NTB," terangnya.

Saat ini, lanjut Akhmad, dana yang dimiliki Kabupaten Lombok Timur memang terbatas. Oleh karena itu, Pemkab Lombok Timur membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat.

Menurutnya, seluruh elemen di Kabupaten Lombok Timur sangat mendukung dan akan berperan aktif dalam rangka pengembangan KPPN Praya.

Dalam FGD ini dihadiri perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kepala Unit Pertanian Keruak, Kepala Desa Senyur, Kepala Desa Ketapang Raya, Kepala Desa Paremas, Sekretaris Desa Tanjung Luar, Kepala Desa Selebung Ketangga serta Perwakilan Kabupaten Lombok Timur. (**devi/infoBPIW**)

Awal 2017, Konstruksi Infrastruktur PUPR di Tiga Kawasan Pariwisata Prioritas Dimulai

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada 2017 akan melaksanakan konstruksi infrastruktur sekaligus menyusun masterplan ketiga destinasi pariwisata prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur dan Mandalika. Demikian disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari mewakili Menteri PUPR dalam Rapat Program Pembangunan Pariwisata Indonesia yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla di Kantor Wapres RI, Jakarta, (21/10).

Hadir pula dalam rapat tersebut, Menteri Koordinator Kemaritiman, Ruhut Panjaitan, Menteri Pariwisata, Arief Yahya, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong serta jajaran dari World Bank.

Saat memberi arahan, Wapres berharap pada 2019 pengembangan tiga destinasi wisata prioritas semuanya sudah rampung. Kemudian, pengembangan kawasan pariwisata Borobudur akan diintegrasikan dengan kawasan pariwisata di sekitarnya seperti Candi Mendut, Candi Prambanan dan Keraton.

Sedangkan pengembangan kawasan pariwisata Mandalika, Wapres menyatakan, pembangunan untuk kawasan tersebut perlu memperhatikan kenyamanan turis yang berasal dari Timur Tengah. Pasalnya, banyak turis dari Timur Tengah yang berkunjung ke Mandalika. "Planning sudah terintegrasi, awal bulan depan akan sudah ada finalisasinya. Nanti akan terlihat siapa yang akan berbuat apa, sehingga ada backward planing-nya," tutur Wapres.

Di tempat yang sama, Rido mengatakan, saat ini beberapa program pengembangan infrastruktur di tiga destinasi wisata prioritas sudah berjalan termasuk developmentplannya juga siap. Dengan begitu, Rido mengusulkan pengembangan tiga destinasi wisata prioritas masuk ke dalam *Green Book* atau Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN) dan Daftar Rencana Kegiatan Hibah (DRKH) 2016.

Rido mengatakan, Kementerian PUPR juga mengusulkan penggunaan mekanisme Project Preparation Funding (PPF) dan Program Project Preparation Assistance (PPA) dalam kegiatan penyusunan Integrated Masterplan pada tiga destinasi

wisata prioritas tersebut kepada World Bank.

"Saat ini Kementerian PUPR tengah dalam proses pembentukan tim lelang dan penyiapan pengumuman lelang, serta finalisasi Term of Reference (TOR) untuk penyusunan Integrated Masterplan pada tiga destinasi wisata prioritas tersebut," paparnya.

Rido mengaku, pihaknya akan mendukung penuh infrastruktur mulai dari akses, peningkatan sumber daya air, keciptakaryaan maupun penyediaan perumahan di tiga destinasi wisata prioritas tersebut. "Pada pengembangan kawasan Danau Toba, saat ini ada proses pembangunan Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi yang ditargetkan selesai pada 2017. Kemudian, ada juga pembangunan Jalan Tol Tebing Tinggi-Siantar-Parapat yang ditargetkan selesai pada 2019," terang Rido.

Selain pembangunan jalan tol, lanjutnya, ada pembangunan jalan bypass lingkaran luar Longat-Tambunan sepanjang 10 km di Kota Balige, jalan akses Bandara Sibisa sepanjang 2,5 km dan pembangunan Jembatan Tano Ponggol di Kabupaten Samsir.

Selain akses, Kementerian PUPR juga



Kepala BPIW, Rido Matari dalam rapat pembahasan 3 KSPN dengan Wapres RI, Jusuf Kalla

Sumber: Dok. BPIW

akan mendukung dari penyediaan prasarana air limbah di daerah kumuh sekitar Danau Toba, peningkatan embung Aek Natonang di Kabupaten Samsir, pemeliharaan dan pembersihan Danau Toba, serta pembangunan baru dan peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 1050 unit yang akan rampung pada 2019.

Terkait pengembangan kawasan Borobudur akan dilaksanakan beberapa pembangunan dan rekonstruksi jalan menuju Borobudur, seperti pembangunan Jal Tol Yogyakarta-Bawen yang akan rampung pada 2019. "Selain akses, Kementerian PUPR juga akan membangun rumah swadaya di Kabupaten Magelang, pengendalian banjir di Sungai Progo, peningkatan fungsi lindung berupa sempadan sungai di kawasan Borobudur dan pembangunan TPS 3R (Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle/mengurangi-menggunakan- daur ulang) di Kabupaten Magelang," jelas Rido.

Dalam pengembangan kawasan

pariwisata di Mandalika, Rido menjelaskan terdapat pembangunan Jalan Gerung menuju Mataram sepanjang 2 KM, peningkatan struktur Jalan Sulin-Penunjak sepanjang 4 KM, pembangunan sumur air tanah untuk air baku di 6 titik Pulau Lombok dan beberapa peningkatan kualitas kawasan kumuh di

Tiga destinasi wisata prioritas sudah berjalan termasuk developmentplannya juga siap. Dengan begitu, Rido mengusulkan pengembangan tiga destinasi wisata prioritas masuk ke dalam *Green Book* atau Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN) dan Daftar Rencana Kegiatan Hibah (DRKH) 2016.

sekitar Mandalika.

Rido menegaskan saat ini beberapa program tersebut sudah berjalan, begitu juga dengan developmentplan dari 3

destinasi wisata prioritas sudah siap. "Tahun 2017, kami akan melaksanakan konstruksi infrastruktur sekaligus menyusun masterplan ketiga destinasi pariwisata prioritas tersebut," tutur Rido.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata, Arief Yahya mengatakan dibutuhkan total Rp 200 Triliun untuk pengembangan 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) sampai dengan tahun 2019. "Sedangkan rata-rata per tahun untuk pembangunan infrastruktur pariwisata ada Rp 6 triliun, maka jika dikalikan sampai dengan tahun 2019, Pemerintah hanya akan sanggup menyediakan sebanyak Rp 30 triliun," tutur Arief.

Untuk itu, lanjutnya, Kementerian Pariwisata menggenjot pembiayaan dari luar dalam government financing. "Salah satunya adalah bekerjasama dengan World Bank dan beberapa private investment untuk fokus di tiga kawasan pariwisata yang prioritas," terangnya. (INI/InfoBPIW)

BPIW Jaring Aspirasi Daerah dalam Mendukung Pengembangan KPPN Daruba



Sumber: Dok. BPIW

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) mendukung pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Daruba di Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara.

Kepala Pusat Pengembangan Perkotaan, BPIW Kementerian PUPR, Agusta Ersada Sinulingga mengungkapkan dukungan yang dilakukan BPIW melalui penyusunan masterplan dan Pra *Detail Engineering Designe* (DED) KPPN Daruba. "KPPN Daruba merupakan salah satu dari 40 KPPN yang menjadi sasaran untuk dikembangkan," papar Agusta saat membuka langsung *Focus Group Discussion* (FGD) Draft

Masterplan dan Pra DED KPPN Daruba di Morotai, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, target pengembangan 40 KPPN tersebut termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Dalam setiap penyusunan masterplan KPPN dilaksanakan melalui beberapa tahapan, antara lain kunjungan survei lapangan dan koordinasi awal. Kemudian, kunjungan lanjutan untuk penajaman informasi kawasan. Kemudian, tahap berikutnya diselenggarakan FGD guna menajaring aspirasi dan masukan dari para pemangku kepentingan di daerah guna penyempurnaan draft *masterplan* yang tengah disusun.

"Terutama untuk menajaring masukan dan

rencana dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dalam pengembangan Daruba ke depannya," papar Agusta. Ia menambahkan, hal tersebut dilakukan karena yang akan menjadi motor pengembangan adalah aparat desa dan pemkab setempat. Di tempat yang sama, Bupati Pulau Morotai, Samsuddin A. Kadir mengungkapkan, Pulau Morotai merupakan wilayah yang strategis. Hal itu telah dibuktikan dengan banyaknya program dari pemerintah pusat di Pulau Morotai. "Seperti program pengembangan kawasan sentra perikanan. Termasuk, program pengembangan KPPN Daruba," jelas Samsuddin.

Ia juga memastikan, seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Pulau Morotai akan pro aktif dalam rencana pengembangan KPPN Daruba. Pasalnya, keterpaduan perencanaan memiliki nilai yang penting untuk pengembangan KPPN

Daruba ke depan.

Lebih lanjut, Samsuddin mengakui, Pemkab Morotai memiliki visi untuk mengembangkan daerahnya menjadi kawasan pariwisata dan perikanan. Untuk itu, perencanaan ke depan di Pulau Morotai perlu dilakukan dalam

Dalam setiap penyusunan masterplan KPPN dilaksanakan melalui beberapa tahapan, antara lain kunjungan survei lapangan dan koordinasi awal. Kemudian, kunjungan lanjutan untuk penajaman informasi kawasan. Kemudian, tahap berikutnya diselenggarakan FGD.

rangka mendukung pengembangan kawasan pariwisata dan perikanan.

Direktur Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemen DPDTT), Nora Ekalina menyatakan, saat ini pihaknya juga turut menggulirkan berbagai program untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di KPPN Daruba.

Nora menilai, dalam pengembangan KPPN Daruba perlu mempertimbangkan pembangunan wilayah antar desa, untuk menciptakan percepatan pengembangan Daruba. Dengan begitu, Nora berharap, percepatan pemerataan taraf hidup masyarakat Daruba akan dapat terlaksana dengan baik.

Menurutnya, RPJMN 2015-2019 mengamanatkan agar dari sekitar 7000 desa tertinggal dapat terentaskan. "Melakukan akselerasi pengembangan desa tertinggal

diperlukan keterlibatan banyak pihak, agar beban pengembangan dapat semakin ringan dan berlangsung dengan waktu yang relative cepat," tutur Nora. **(devi/infoBPIW)**



Suasana saat FGD Draft Masterplan dan Pra DED KPPN Daruba di Morotai,

Sumber: Dok. BPIW

Pengembangan KPPN Labuan Bajo

BPIW Jaring Aspirasi Dalam Finalisasi Masterplan dan Pra DED



Salah satu sisi pantai Labuhan bajo

Sumber: Dok. BPIW

Potensi pariwisata dan kelautan yang dimiliki Desa Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadikan kawasan ini masuk dalam 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Selain itu, Labuan Bajo juga merupakan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yang akan dikembangkan pemerintah. Dalam mendukung percepatan pengembangan KPPN Labuan Bajo sebagai pusat destinasi pariwisata dan aktivitas ekonomi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Kecil dan Perdesaan, Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menjangkau aspirasi untuk finalisasi Masterplan dan Pra Detail Engineering Design (DED) KPPN Labuan Bajo. BPIW Kementerian PUPR melalui Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Kecil dan Perdesaan menggelar *focus*

group discussion (FGD) finalisasi *Draft Masterplan* dan *Pra Detail Engineering Design* (DED) Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, baru-baru ini. Kegiatan yang digelar untuk menjangkau aspirasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkab Manggarai Barat itu guna penyempurnaan *draft masterplan* dan pra DED yang telah disusun tim. Saat memberikan arahan pada pembukaan kegiatan tersebut, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW, Agusta Ersada Sinulingga mengatakan penyusunan *masterplan* pengembangan kawasan perdesaan merupakan dokumen kesepakatan dan acuan bersama para pemangku kepentingan, yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah, investor dan masyarakat. *Masterplan* tersebut merupakan tindak lanjut dari rencana pengembangan KPPN untuk lima tahun ke depan.

Lebih lanjut Agusta menyatakan, dalam rangka pengembangan potensi utama Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata, kawasan perdesaan bertugas sebagai *hinterland* tempat berlangsungnya aktivitas produksi dan pengolahan sumber daya alam yang memperkuat fungsi wisata tersebut. "Pada Nawacita poin ke-3 digariskan bahwa pembangunan Indonesia akan dimulai dari pinggiran yang dilakukan dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Kawasan perdesaan Labuan Bajo merupakan salah satu yang kita dukung pengembangannya," paparnya. Labuan Bajo, lanjutnya, memiliki potensi wisata bahari yang sangat besar dan mulai dilirik dunia. Saat ini Labuan Bajo termasuk sebagai salah satu dari 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang akan dikembangkan sebagai Bali baru oleh pemerintah. Visi ini tentunya perlu didukung dengan pengembangan infrastruktur kepariwisataan yang bertaraf internasional.

Dengan penetapan KSPN tersebut, menurut Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Kecil dan Perdesaan, Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW Kementerian PUPR, Sanusi Sitorus, produksi pertanian yang dihasilkan, diarahkan untuk menunjang kawasan pariwisata yang ada di daerah tersebut. Dengan demikian hotel – hotel maupun restoran tidak lagi mendatangkan bahan makanan dari daerah lain, melainkan dari produk pertanian yang ada di Kecamatan Komodo itu. Lebih lanjut Sanusi menjelaskan Kementerian PUPR dalam pengembangan kawasan perdesaan dapat mendukung ke dalam dua sektor, yaitu pertama, pembangunan atau rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian, perikanan, dan destinasi wisata. Kedua, pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi. "Dukungan infrastruktur PUPR terhadap kawasan perdesaan terdiri dari tiga sektor, yaitu menunjang produksi, menunjang pengolahan, dan menunjang

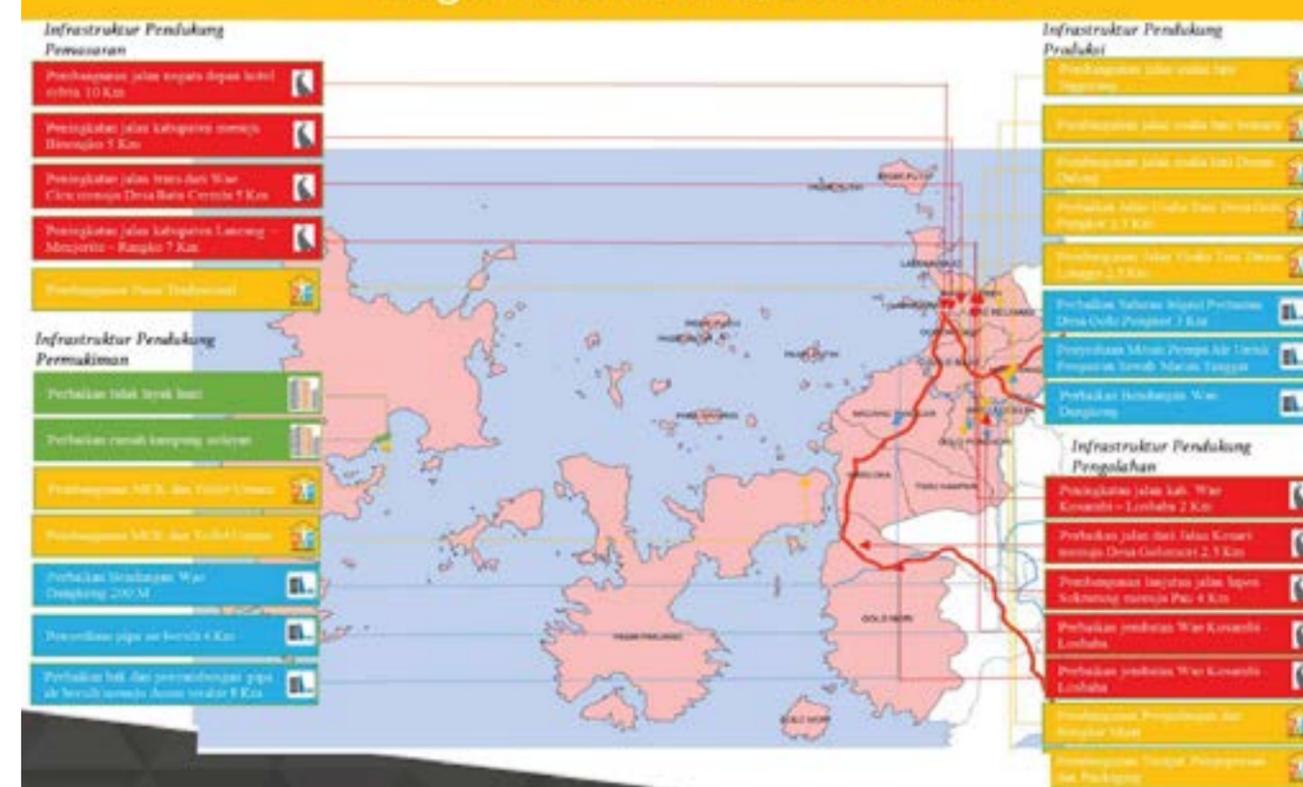
pemasaran," ungkap Sanusi. Kepala Bappeda Kabupaten Manggarai Barat, Drs. Agustinus, Dula mengatakan program – program yang ada didalam *master plan* harus dikawal dengan baik, agar dapat diimplementasikan oleh kementerian atau

Dalam rangka pengembangan potensi utama Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata, kawasan perdesaan bertugas sebagai *hinterland* tempat berlangsungnya aktivitas produksi dan pengolahan sumber daya alam yang memperkuat fungsi wisata tersebut.

lembaga maupun SKPD, sesuai tugas dan fungsi masing – masing. Dengan demikian *masterplan* yang sudah disusun tidak sekedar menjadi dokumen semata. Dalam FGD tersebut disimpulkan beberapa hal, seperti perlu adanya penambahan

gudang untuk digunakan sebagai penyimpanan pupuk maupun penyimpanan hasil produksi pertanian. Selain itu penanganan sampah yang belum maksimal, dimana volume sampah sudah sangat tinggi, sehingga perlu adanya perhatian lebih, apalagi kebersihan salah satu aspek yang penting dalam pengembangan pariwisata. Masalah sampah ini merupakan salah satu permasalahan utama yang hampir terjadi di semua desa yang ada di Kecamatan Komodo. Hasil dari kegiatan ini akan ditindaklanjuti dengan revisi atau perbaikan *masterplan* berdasarkan masukan dari tiap instansi dan persiapan *summary report*. Beberapa instansi yang ikut dalam acara tersebut yakni Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, serta instansi terkait yang ada di daerah itu. (Devi/infobpiw)

Program Utama Infrastruktur PUPR





Menata Daerah Aliran Sungai Ciliwung

Sumber: Dok BPIW

Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung memiliki peran strategis di ibu kota negara. Tak mengherankan, segala hal yang terjadi di kawasan DAS Ciliwung kerap menjadi isu nasional. Bahkan, menjadi perhatian dunia. Sehingga, sudah sewajarnya sungai terpanjang di ibu kota negara ini mendapat perhatian khusus, agar keberadaannya tetap memberi dampak positif bagi kehidupan di perkotaan ibu kota.

Butuh banyak inovasi dalam mengelola DAS Ciliwung, agar sungai yang berhulu di kawasan Bogor ini dapat selalu berfungsi dengan ideal. Saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memiliki sejumlah program dalam rangka menjaga fungsi sungai tersebut.

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR saat ini sedang melakukan kajian dan desain untuk penataan wilayah di bantaran Sungai Ciliwung, khususnya dari kawasan Pasar Rumput hingga Pasar Minggu, sepanjang sekitar 20 km. Normalisasi Sungai Ciliwung tersebut sedang dilakukan oleh Ditjen Sumber Daya Air (SDA) bersama dengan Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Kajian mengenai sungai tersebut menyangkut analisis penduduk yang akan terkena dampak normalisasi dan desain untuk peremajaan wilayah di bantaran sungai.

"Kita saat ini sedang mengkaji dan membuat desain penataan wilayah di bantaran Sungai Ciliwung berdasarkan penugasan dari Kantor Sekretariat Wakil Presiden," tutur Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, BPIW Kementerian PUPR, Hadi Suahyono, belum

lama ini.

Menurut Hadi, instansinya sedang berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah DKI Jakarta, khususnya Dinas Perumahan DKI Jakarta, Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan dan Pemkot Jakarta

Timur yang akan memberikan masukan mengenai data jumlah penduduk yang bermukim di bantaran Sungai Ciliwung. Berdasarkan hal tersebut menurut Hadi, Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR yang ia pimpin sedang menyelesaikan desain peremajaan wilayah di bantaran Sungai Ciliwung, termasuk desain relokasi penduduk dari bantaran Sungai Ciliwung ke rumah susun (rusun) yang akan disiapkan oleh Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

Sebagai Informasi, sebelumnya pada tahun 2015 lalu Kementerian PUPR telah

membangun rusun di Jatinegara/ Kampung Melayu yang mempunyai 16 lantai dan dilengkapi dengan lift dan AC, serta perangkat CCTV, sehingga mempunyai standar kelayakan dan keamanan yang cukup tinggi.

Pembangunan rusun dengan ketinggian relatif tinggi dimaksudkan

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR saat ini sedang melakukan kajian dan desain untuk penataan wilayah di bantaran Sungai Ciliwung, khususnya dari kawasan Pasar Rumput hingga Pasar Minggu, sepanjang sekitar 20 km.



untuk mengoptimalkan lahan di Jakarta yang cukup terbatas luasnya, sehingga diperlukan rusun dengan daya tampung cukup banyak untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR di sekitar Sungai Ciliwung.

"Kajian dan penyusunan desain penataan wilayah di bantaran Sungai Ciliwung, dilakukan dengan berkoordinasi dengan Ditjen SDA yang melakukan normalisasi Sungai Ciliwung, dan Pemerintah Daerah DKI Jakarta, serta arahan dari Sekretariat Wakil Presiden," tutur Hadi.

Menurutnya, normalisasi sungai tersebut untuk menjadikan lebar sungai 35-50 m. Normalisasi ini akan berdampak pada kepada penduduk yang bermukim di bantaran Sungai Ciliwung untuk di relokasi ke rusun yang layak huni dan berkualitas, seperti yang pernah dibuat Kementerian PUPR di Rusun Jatinegara atau Kampung Melayu.

Ia juga menjelaskan beberapa lokasi

juga akan dilakukan sodetan sungai yang akan memberikan lahan berpotensi untuk peremajaan kawasan berupa pembangunan rusun dengan ketinggian 16 hingga 21 lantai yang dilengkapi fasilitas sosial dan fasilitas umum seperti taman, tempat ibadah, dan sekolah.

Manfaat dari penataan wilayah di bantaran Sungai Ciliwung yakni

menjadikan alur Sungai Ciliwung menjadi normal untuk menghindari banjir, dan sekaligus pembangunan tanggul dan jalan inspeksi di sisi sungai dengan lebar 6-8 m. "Selain itu, tentunya upaya ini akan memberikan tempat hunian yang lebih layak kepada MBR di bantaran Sungai Ciliwung," ujar Hadi.

Penanganan DAS Ciliwung juga termasuk permukiman kumuh sepanjang 19 km. Dengan dilakukannya penataan permukiman kumuh, maka kemungkinan banyak warga yang akan dilakukan relokasi.

Dengan pembangunan rusun akan diperoleh ketersediaan rumah mencapai 14.751 unit. Untuk memperlancar kegiatan tersebut, menurut Hadi, diperlukan percepatan pendataan pemilik lahan dan bangunan yang terdampak di lokasi normalisasi sungai dan sodetan, serta percepatan pembebasan lahan. Proses pembebasan lahan ini dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota

Jakarta Selatan, BPN Kota Jakarta Timur dan Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta.

Kementerian PUPR memiliki perhatian serius terhadap kawasan DAS Ciliwung karena posisi DAS Ciliwung melintasi ibu kota negara. Sehingga, segala hal yang terjadi di kawasan DAS Ciliwung kerap

"Kajian dan penyusunan desain penataan wilayah di bantaran Sungai Ciliwung, dilakukan dengan berkoordinasi dengan Ditjen SDA yang melakukan normalisasi Sungai Ciliwung, dan Pemerintah Daerah DKI Jakarta, serta arahan dari Sekretariat Wakil Presiden," tutur Hadi.

RENCANA SUDETAN KALI CILIWUNG DI KEL. KEBON BARU

GAMBAR LAY OUT RENCANA SUDETAN

Keterangan :

- Luas Lahan Sudetan = ± 0,33 Ha
- Luas Lahan Bekas Sungai = ± 1,61 Ha
- Jumlah KK yang Harus Dibebeaskan = ± 120
- Luas Lahan antara Sudetan dan Bekas Sungai = 2,82 Ha



menjadi perhatian nasional. Kawasan DAS Ciliwung memang cukup panjang dan luas. Oleh karena itu, BPIW mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk melakukan prioritas penataan di kawasan DAS Ciliwung.

Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta diharapkan dapat menyampaikan rencana detail penataan dan pengembangan di kawasan tersebut, agar DAS Ciliwung dapat semakin tertata dengan baik. Saat ini telah dibentuk tim gabungan dari Kementerian PUPR dan Pemprov DKI agar perencanaan penataan pemukiman di DAS Ciliwung dapat dibuat sesuai harapan. Total luas DAS Ciliwung mencapai 337 km² dengan panjang sungai utama 109,7 km, sehingga dilakukan pola kawasan prioritas dalam penataan mengingat kemampuan finansial

Pemprov DKI ataupun alokasi dari kementerian yang terbatas. Normalisasi DAS Ciliwung akan memiliki banyak manfaat, antara lain pengembalian kondisi lebar Sungai Ciliwung menjadi kondisi normal, yaitu 35-50 meter. Kemudian, adanya penguatan tebing, pembangunan tanggul dan jalan inspeksi di sepanjang sisi sungai. Selain itu, difungsikan sempadan kali sebagai jalan inspeksi, dengan lebar 6-8 meter.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas tampung alir dari 200 m³/det menjadi 570 m³/det serta sebagai pencegahan banjir pada daerah rawan banjir seperti di Bukit Duri, Kebon Baru, Bidara Cina, Kampung Melayu, Pengadegan, Gang Arus, Rawa Jati, Kalibata dan Kramat Jati.

"Perlu juga koordinasi perencanaan yang sedang dan telah dilakukan oleh instansi terkait misalnya kementerian atau lembaga, Pemda DKI Jakarta bahkan kalangan lembaga swadaya masyarakat," ujarnya.

Selain itu, perlu sosialisasi dan pembinaan, agar masyarakat dapat menerima pembangunan dan pengembangan permukiman di kawasan DAS Ciliwung. Keterpaduan pendanaan diperlukan juga untuk membangun dan mengembangkan permukiman di kawasan DAS Ciliwung. Kemudian, perlu juga disiapkan kelembagaan saat implementasi dan

pasca implementasi pembangunan dan pengembangan permukiman di kawasan DAS Ciliwung.

Ia berharap, normalisasi dan peremajaan DAS Ciliwung akan membawa dampak yang positif bagi kelangsungan sungai itu sendiri maupun kehidupan sosial masyarakat. q(**)

"Kajian dan penyusunan desain penataan wilayah di bantaran Sungai Ciliwung, dilakukan dengan berkoordinasi dengan Ditjen SDA yang melakukan normalisasi Sungai Ciliwung, dan Pemerintah Daerah DKI Jakarta, serta arahan dari Sekretariat Wakil Presiden," tutur Hadi.

Development Plan dan Sistem Manajemen Mutu di Pusat Pengembangan kawasan Perkotaan



Melva Eryani Marpaung, ST, MUM

Kabag Anggaran dan Umum, Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan

Sesuai dengan Permen PUPR Nomor 15 Tahun 2015, Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, memiliki tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, serta pengembangan area inkubasi di kawasan perkotaan yang menterpadukan antara pengembangan berbagai kawasan dan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat di kawasan perkotaan, serta keterkaitan antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- koordinasi dan pengembangan area inkubasi di kawasan perkotaan;
- penyusunan pedoman teknis keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
- pelaksanaan penyusunan program dan anggaran serta urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Development Plan

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut diatas, dapat terlihat bahwa keluaran utama dari Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan yang terdiri dari bagian Anggaran dan Umum dan 3 bidang teknis yaitu, pertama, (1) Metropolitan, (2) Kota Besar dan Kota Baru, (3) Kota Kecil dan Perdesaan adalah lebih kepada koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program keterpaduan, koordinasi dan pengembangan area inkubasi dan penyusunan pedoman teknis keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Keluaran tersebut dipenuhi dengan Pelaksanaan Penyusunan Rencana dan Program Pengembangan Kawasan Perkotaan (Development Plan) oleh 5 Bidang yang terdapat di Pusat tersebut.

Development plan adalah penyusunan rencana dan program pengembangan infrastruktur PUPR dan infrastruktur strategis lainnya (non-PUPR) di kawasan perkotaan dan sekitarnya yang terpadu antarsektor, antarwilayah, dan antartingkat pemerintahan berdasarkan kebutuhan jangka panjang (10 tahun), jangka menengah (5 tahunan), dan jangka pendek (1 tahun) dalam rangka meningkatkan fungsi kawasan perkotaan yang smart/cerdas (hijau, teknologi, serta berkelanjutan serta berketahanan iklim dan bencana) dan meningkatkan pelayanan publik.

Dalam penyusunan development plan tersebut, dilakukan serangkaian proses pelaksanaan yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja yang memuat uraian lingkup kegiatan dan output yang ingin dicapai dari masing-masing proses menuju output akhir yang sesuai kebijakan yang ditetapkan dan sasaran yang ingin diwujudkan.

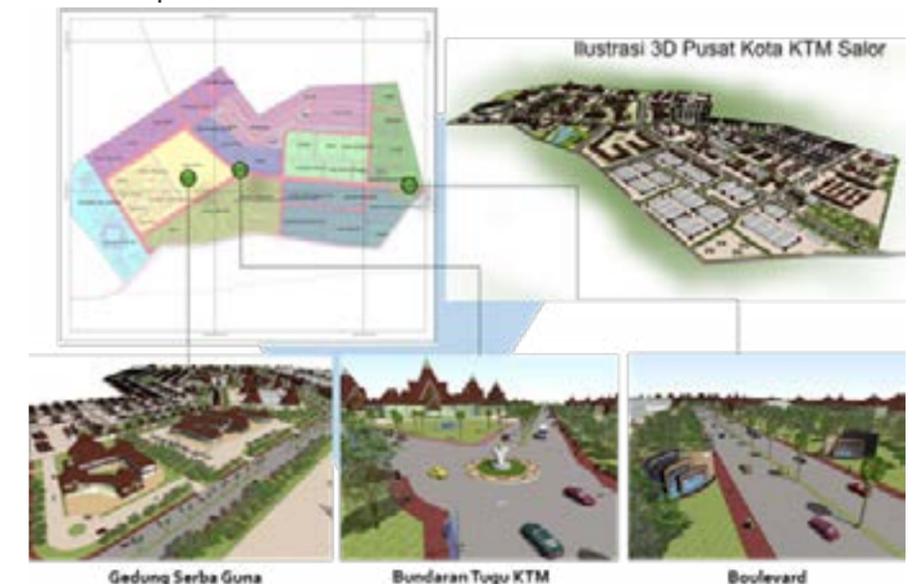
Dalam penyusunan development plan diperlukan sejumlah pendekatan. Salah satu pendekatan yang cukup penting

adalah Proses Pendekatan dimana dengan pendekatan ini proses yang dilakukan konsisten dan dapat memperkirakan hasil yang dicapai akan lebih efektif dan efisien

Development plan adalah penyusunan rencana dan program pengembangan infrastruktur PUPR dan infrastruktur strategis lainnya (non-PUPR) di kawasan perkotaan dan sekitarnya yang terpadu antar-sektor, antarwilayah, dan antartingkat pemerintahan berdasarkan kebutuhan jangka panjang (10 tahun), jangka menengah (5 tahunan), dan jangka pendek (1 tahun).

bila kegiatan dipahami dan dikelola sebagai proses yang berfungsi sebagai system yang koheren.

Contoh Development Plan



Lebih lanjut, development plan menjadi dokumen yang diperlukan untuk memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian proses kegiatan dilakukan secara efektif dan Rencana Keterpaduan Infrastruktur yang dihasilkan telah memenuhi persyaratan berkualitas melalui serangkaian prosedur, tanggung jawab yang

terdokumentasikan dengan baik.

Sistem Manajemen Mutu

Dalam era globalisasi saat ini tantangan terbesar bagi suatu lembaga baik itu pemerintah atau swasta adalah kemampuan untuk untuk menjamin kepuasan pelanggan atau mitra kerja. Pertanyaannya adalah apa ukuran bahwa suatu lembaga mampu melakukan itu?. Apa jaminan bahwa produk yang dihasilkan memuaskan pelanggan?. Bagaimana membuktikan bahwa produk yang satu dengan produk lain yang akan dihasilkan memuaskan pelanggan?. Untuk

menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, lembaga baik itu pemerintah atau swasta di negara – negara maju juga di negara –

negara berkembang sudah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001. Standar ini merupakan sarana atau sebagai alat untuk dapat mencapai tujuan mutu dalam menerapkan Total Quality Control sehingga efektifitas dan efisiensi pekerjaan dapat tercapai.

Dalam upaya penerapan Sistem

Manajemen Mutu (SMM) secara efektif, maka dituntut adanya suatu kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengelola seluruh proses kerja yang saling berhubungan dan berinteraksi baik secara intern maupun ekstern. Selain itu, perlunya kemampuan dalam meningkatkan secara terus menerus efektifitas dari proses sistem manajemen mutu, sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan dan sasaran mutu yang telah ditetapkan.

Perlu adanya suatu program berkesinambungan yang perlu didukung oleh semua personel yang terlibat dalam penerapan sistem ini.

Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan merupakan salah satu sub unit organisasi di Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), dimana BPIW merupakan unit organisasi baru di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. BPIW mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Untuk menjamin tugas dan fungsi BPIW dapat berjalan dengan baik, maka salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan menerapkan SMM. Dengan adanya SMM ini dapat menjadi standar baku dalam penyelenggaraan organisasi. Adapun penerapan SMM di lingkungan BPIW mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum.

ISO 9001 diterbitkan oleh the International Organization for Standardization. Organisasi ini lebih dikenal dengan nama ISO. ISO adalah organisasi internasional yang merupakan

federasi dari lembaga-lembaga standar nasional. ISO didirikan pada tahun 1948 dan berpusat di Jenewa, Swiss. Di Indonesia telah terdapat Badan standardisasi nasional bersama yaitu BSN (Badan Standardisasi Nasional) yang mengelola standar di Indonesia dan menjadi wakil Indonesia di ISO.

Tujuan ISO 9001 adalah untuk menjadi standar acuan bagi organisasi dalam menyusun sistem manajemen mutunya.

Manfaat dari adanya penerapan SMM antara lain memberikan penjaminan pencapaian mutu, selalu berorientasi memenuhi harapan pengguna (pelanggan dan pihak berkepentingan), mengeliminir terjadinya pengulangan/perbaikan (efisiensi dari segi waktu dan biaya), tertib dokumentasi dan menciptakan suasana kerja yang kondusif

Dengan menerapkan ISO 9001 organisasi dapat menyediakan barang atau jasa yang selalu konsisten untuk memenuhi persyaratan (memuaskan) pelanggan, melaksanakan peningkatan secara berkelanjutan, dan memenuhi peraturan yang mengikat produk dan / atau jasanya.

SMM merupakan sistem manajemen organisasi untuk mengarahkan dan mengendalikan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan non konstruksi di setiap Unit Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan dan Penyedia Jasa dalam pencapaian mutu. Lingkup dari SMM meliputi:

- Pengelolaan proses kegiatan/bisnis yang berdampak pada mutu, mulai dari input sampai output/outcome dengan adopsi prinsip "PDCA" atau Plan, Do, Check, Action
- Peningkatan kompetensi SDM
- Pendokumentasian dan penyiapan

dokumen SMM untuk mengatur proses-proses utama Organisasi, memperbaiki secara terus menerus efisiensi organisasi dan mencapai kepuasan pelanggan

Manfaat dari adanya penerapan SMM antara lain memberikan penjaminan pencapaian mutu, selalu berorientasi memenuhi harapan pengguna (pelanggan dan pihak berkepentingan), mengeliminir terjadinya pengulangan/perbaikan (efisiensi dari segi waktu dan biaya), tertib dokumentasi dan menciptakan suasana kerja yang kondusif (melibatkan semua personil, adanya mekanisme kerja yang jelas).

Adapun latar belakang Penerapan SMM di Kementerian PUPR antara lain:

- Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan mutu prasarana bidang PUPR masih rendah dan perlu ditingkatkan
- Perlunya peningkatan mutu konstruksi prasarana yang dibangun
- Perlunya dukungan administratif dan sumber daya yang berkualitas untuk terwujudnya prasarana bidang PUPR yang handal
- Mendukung terwujudnya VISI Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang merupakan prioritas utama Pemerintah
- Perlunya memiliki standarisasi mutu dalam menghadapi era pasar bebas pada tahun 2015.

ISO 9001 yang berlaku saat ini adalah edisi kelima yang diterbitkan pada September 2015, atau dikenal dengan sebutan ISO 9001:2015. ISO 9001 sebelumnya adalah: ISO 9001:1987, ISO 9001:1994, ISO 9001:2000 dan ISO 9001:2008. Beberapa manfaat potensial pelaksanaan ISO 9001:2015, antara lain:

1. Memiliki kemampuan untuk secara konsisten menyediakan produk dan jasa yang memenuhi persyaratan pelanggan

dan peraturan;

2. Memiliki peluang untuk meningkatkan kepuasan pelanggan;
3. Bisa mengenali risiko dan peluang terkait dengan konteks organisasi dan sasarnya;
4. Dapat menunjukkan kesesuaiannya dengan persyaratan SMM Internasional.

Salah satu perubahan di ISO 9001:2015 ini adalah sudah memasukkan Manajemen Risiko dalam Dokumen Sistem Mutu yang dapat mengacu pada Instruksi Menteri PU No. 02/IN/M/2011 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Hal ini dapat dilakukan secara bertahap dengan mengidentifikasi resiko yang ada.

SMM Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan

Pada tahun 2016 ini Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan melaksanakan penerapan SMM sampai dengan pelaksanaan proses sertifikasi ISO 9001:2015. SMM menjadi standar baku dalam penyelenggaraan organisasi dan kegiatan di Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan.

Pelaksanaan SMM di Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan menggunakan pendekatan pengelolaan proses kegiatan/bisnis yang berdampak pada mutu, mulai dari input sampai dengan output/outcome dengan mengadopsi prinsip PDCA.

Kebijakan mutu merupakan maksud dan arahan secara menyeluruh sebuah organisasi yang terkait dengan mutu, seperti yang dinyatakan secara resmi oleh manajemen puncak. Kebijakan Mutu BPIW adalah Menjamin Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Ketersediaan Infrastruktur PUPR yang Handal Bagi Masyarakat Melalui Peningkatan Mutu Kegiatan Secara Berkesinambungan.

Adapun Kebijakan Mutu Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan adalah

MENJAMIN PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS, RENCANA DAN PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN YANG MEMENUHI KETENTUAN, SESUAI KEBUTUHAN DAN HARAPAN STAKE HOLDER SERTA SECARA BERKELANJUTAN

Kebijakan Mutu BPIW adalah Menjamin Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Ketersediaan Infrastruktur PUPR yang Handal Bagi Masyarakat Melalui Peningkatan Mutu Kegiatan Secara Berkesinambungan.

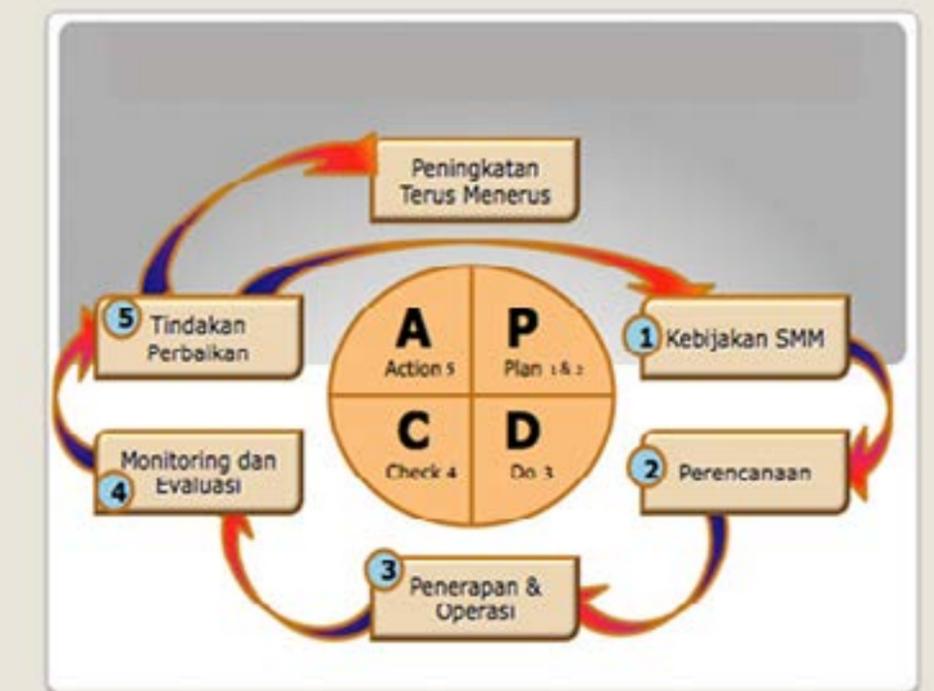
MENINGKATKAN MUTU SDM DAN KINERJANYA

Kebijakan Mutu tersebut di atas mengandung konsekuensi bagi seluruh Unit Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan untuk mengarahkan seluruh kegiatannya agar selalu melakukan peningkatan kinerja

dalam melaksanakan kegiatannya sehingga Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan dapat mendukung terlaksananya produk Keterpaduan dan Sinkronisasi Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur Wilayah yang dapat memenuhi harapan masyarakat.

Agar Kebijakan Mutu tersebut dapat menjadi arahan seluruh jajaran di Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan maka Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan harus melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a) Meningkatkan mutu kegiatan berdasarkan prioritas program dan perencanaan yang realistis serta pelaksanaan yang efektif dan efisien;
 - b) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan membina sumber daya manusia memiliki rasa tanggung jawab dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah digariskan; dan
 - c) Meningkatkan mutu pelayanan untuk memenuhi kepuasan pelanggan atau pihak yang berkepentingan.
- Salah satu dokumen yang digunakan



untuk melaksanakan kegiatan di Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan merupakan dokumen yang diperlukan untuk memastikan bahwa perencanaan, operasi serta pengendalian proses kegiatan dilakukan secara efektif. Dokumen tersebut adalah Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana dan Program Pengembangan Kawasan Perkotaan (PP Development Plan), yang merupakan dokumen standar kerja yang diperlukan oleh setiap Bidang yang melibatkan lebih dari satu bagian/orang dengan tugas yang berbeda.

Petunjuk Pelaksana Development Plan

Dalam PP Development Plan menjelaskan mengenai tahapan penyusunan rencana dan program pengembangan kawasan

perkotaan dari tahap perencanaan kegiatan sampai dengan tahap pendistribusian hasil pekerjaan dan menerima feedback (evaluasi produk) dari stakeholder. Dalam tahapan yang dilakukan dimulai dari pemrograman

penerapan SMM kedepannya diharapkan akan memberikan kemampuan kepada organisasi yaitu Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan dalam melakukan kontrol produk (output) yang dihasilkan, sehingga Pusat ini akan lebih terbantu dalam mencapai dan meningkatkan mutu produk

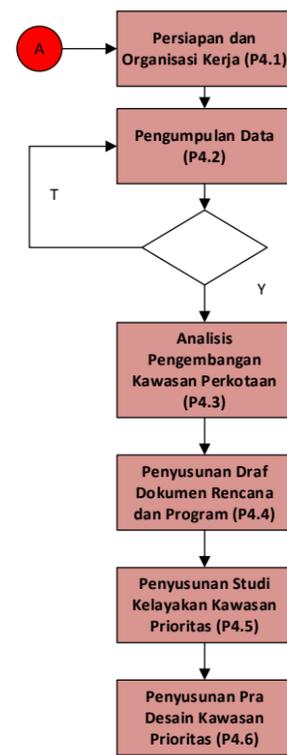
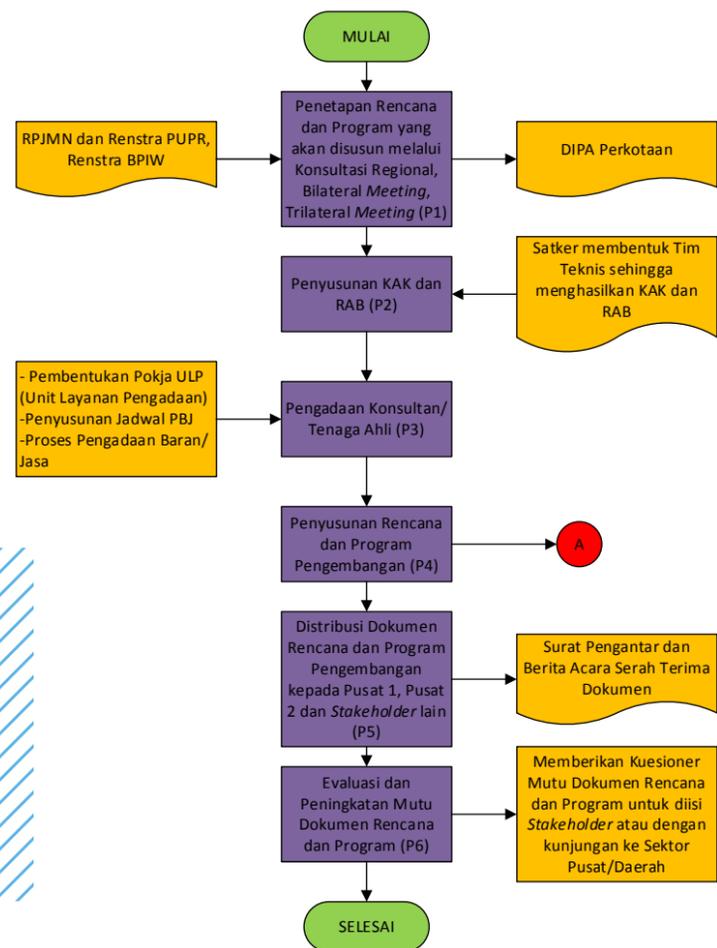
kegiatan dari tahun sebelumnya sampai keluar sebuah produk rencana pengembangan baik jangka panjang maupun jangka pendek.

Dalam PP Development Plan diatur

bagaimana semua bidang di Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan memulai persiapan dan organisasi kerja sehingga tercipta jadwal kerja yang nantinya menjadi acuan dalam bekerja. Setelah persiapan, dilanjutkan dengan pengumpulan data dan kajian literatur. Setelah data dan informasi terkumpul kemudian dilakukan analisis pengembangan kawasan perkotaan dengan membuat rencana dan program, penyusunan studi kelayakan dan pra desain kawasan prioritas yang telah ditetapkan.

Semua kegiatan yang telah dikerjakan tersebut dicatat sehingga tercipta sebuah prosedur baku untuk menjamin kualitas dari produk rencana pengembangan yang dibuat. Diharapkan dengan melakukan setiap langkah yang telah ditetapkan akan secara otomatis menjaga kualitas produk

Tahapan Penyusunan Rencana dan Program Pengembangan Kawasan Perkotaan



agar dapat diterima oleh stakeholder yang berkepentingan terkait rencana pengembangan tersebut.

Tahapan Penyusunan Rencana dan Program Pengembangan Kawasan Perkotaan

Dokumen Sistem Mutu (DSM) yang telah disusun dan disahkan oleh Pimpinan Puncak Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan meliputi:

NO	JUDUL DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN
1.	Manual Mutu	DSM/Wk/M/01
2.	PM Pengendalian Dokumen Sistem Mutu	DSM/Wk/PM/01
3.	PM Pengendalian Rekaman	DSM/Wk/PM/02
4.	PM Audit Internal SMM	DSM/Wk/PM/03
5.	PM Pengendalian Hasil Tidak Sesuai	DSM/Wk/PM/04
6.	PM Tindakan Korektif	DSM/Wk/PM /05
7.	PM Tindakan Pencegahan	DSM/Wk/PM/06
8.	PP Penyusunan Rencana dan Program Pengembangan Kawasan Perkotaan	DSM/Wk/PP/01
9.	PP Kaji Ulang Manajemen/Rapat Tinjauan Manajemen	DSM/Wk/PP/03
10.	PP Peningkatan Kompetensi Pegawai	DSM/Wk/PP/04
11.	PP Rapat Internal	DSM/Wk/PP/05
12.	PP Sosialisasi	DSM/Wk/PP/06
13.	IK Penyusunan Dokumen Sistem Mutu	DSM/Wk/IK/01

Untuk melakukan audit atas penerapan Sistem Manajemen Mutu di Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan maka dilakukan audit mutu. Pelaksanaan Audit Eksternal SMM di Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan dilakukan oleh Tim Auditor dari The British Standards Institution (BSI).

Dalam proses audit, auditor membacakan tahap demi tahap dari proses atau kegiatan dalam Prosedur Mutu, Petunjuk Pelaksanaan, Instruksi Kerja dan dokumen lain. Kemudian auditor meminta kepada auditee untuk menunjukkan rekaman/bukti pelaksanaan proses atau kegiatan tersebut.

Hasil dari audit eksternal SMM yang telah dilakukan pada tanggal 7 November 2016,

Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan direkomendasikan untuk mendapatkan Sertifikat ISO 9001:2015 Quality Management System dari badan sertifikasi BSI (British Standard Institution).

Dengan dikeluarkannya Sertifikat tersebut, penerapan SMM kedepannya diharapkan akan memberikan kemampuan kepada organisasi yaitu Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan dalam melakukan

merupakan suatu beban di awal, namun kedepannya SMM justru akan mempermudah pekerjaan yang kompleks dan menantang di Pusat ini yang akan dilakukan dengan lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Komitmen dari pimpinan dan manajemen serta pegawai yaitu Kepala Pusat dan Para Kepala Bagian/Bidang di Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan merupakan hal yang sangat penting karena keberhasilan penerapan Sistem Manajemen Mutu merupakan tanggung jawab bersama. Untuk itu harus dijadikan kebiasaan write what you do and do what you write atau tulis yang anda kerjakan, kerjakan yang anda tulis.

kontrol produk (output) yang dihasilkan, sehingga Pusat ini akan lebih terbantu dalam mencapai dan meningkatkan mutu produk dan diharapkan seluruh kegiatan yang ada akan berjalan dengan efektif dan akuntabel. Penerapan SMM mungkin



Proses Penyusunan SMM Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Sertifikat ISO 9001:2015 yang diperoleh dari British Standard Institute BSI

Selat Karimata, Potensi Wisata Bahari yang Tersembunyi

Indonesia merupakan negara bahari dan negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi pembangunan SDA dan jasa-jasa lingkungan/*environmental services* yang sangat besar, namun hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satu potensi sektor pembangunan yang belum dikembangkan secara optimal adalah pariwisata bahari (*marine tourism*). Salah satu potensi pariwisata bahari tersembunyi yang terletak di Pulau Kalimantan adalah Pulau Karimata yang terletak di Selat Karimata, Kabupaten Kayong Utara.

Selat Karimata adalah selat luas yang menghubungkan Laut China Selatan dengan Laut Jawa. Selat ini terletak di antara Pulau Sumatera dan Kalimantan. Lebar selat ini sekitar 150 kilometer apabila diukur dari Kalimantan hingga Pulau Belitung. Belitung dipisahkan dari Pulau Bangka oleh Selat Gaspar. Bangka terletak dekat pesisir timur Sumatera yang dipisahkan oleh Selat Bangka. Kepulauan Karimata terletak di Selat Karimata. Selat Karimata juga merupakan salah satu selat terbesar di Indonesia.

Pulau Karimata sendiri memiliki luas sekitar 77.000 hektar yang berstatus Suaka Alam

Laut (SAL), menjanjikan keindahan bawah laut yang belum banyak dikenal oleh para pehobi kegiatan bawah laut di Indonesia. Di samping eksotisme taman lautnya, potensi *landscape* kepulauan yang dihuni oleh lebih dari 1.400 jiwa ini menawarkan pesona yang tidak kalah menawan. Secara geografis, kepulauan ini berada di selat perairan antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Gugusannya terdiri dari dua pulau besar, yaitu Pulau Karimata dan Pulau Serutu, serta beberapa pulau kecil nan

Secara geografis, kepulauan ini berada di selat perairan antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Gugusannya terdiri dari dua pulau besar, yaitu Pulau Karimata dan Pulau Serutu, serta beberapa pulau kecil nan memesonakan.

memesonakan, diantaranya Pulau Kelumpang, Pulau Buluh, Pulau Belian, Pulau Busung, Pulau Segunung, Pulau Genting, Pulau Serungganing dan Pulau Kera. Karimata dapat dijadikan alternatif wisata laut di Tanah Air. Berbagai agenda akan digelar pada Festival Karimata di antaranya *journalist trip*, lomba memancing, lomba foto, lomba sampan nelayan, wisata kuliner

yang hingga kini total pesertanya sudah sekitar 300 orang.

Kepulauan Karimata juga punya banyak potensi wisata yang menarik. Mulai dari gugusan pulau cantik hingga kekayaan bawah laut yang mempesona, semua dapat dinikmati oleh *traveller*. Untuk potensi wisata, Kepulauan Karimata memang punya puluhan pulau indah. Beberapa yang paling populer adalah Pulau Kayang, Betok, Pelapis, Buluh dan lainnya. Selain punya keunikan masing-masing, setiap pulau juga indah dan menarik untuk dikunjungi. Baik pulau yang sudah berpenghuni maupun yang tak berpenghuni.

Kecamatan Kepulauan Karimata mempunyai beberapa desa. Namun antara desa satu dan yang lainnya berada di pulau lain, sehingga membutuhkan sedikit perjuangan untuk bisa sampai ke sana. Namun demikian, rasa letih tersebut akan terbayar dengan pemandangan yang bisa kita saksikan sepanjang perjalanan.

Dalam perjalanan kita bisa menyaksikan pulau-pulau kecil dengan pemandangan yang sangat menarik, pepohonan tumbuh dengan subur dan terjaga. Tak jauh dari pulau tersebut, kita bisa menyaksikan bagan milik nelayan yang dijadikan untuk menangkap

ikan. Mata kita akan semakin dimanjakan dengan pemandangan menarik setelah kita sampai ke pulau yang dihuni oleh penduduk. Seperti di pulau Meledang, di sini kita bisa menyaksikan kehidupan nelayan yang sedang beraktifitas mengolah ikan hasil tangkapan, mulai dari proses pemasakan sampai dengan penjemuran.

Selain, memiliki wisata bahari yang menawan, Pulau Karimata, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, kini mempunyai ikon wisata religi kota baru, yakni sebuah masjid yang megah yang dibangun di atas air bernama Masjid Oesman Al Khair. Masjid yang berdiri di Kecamatan Sukadana ini dibangun di atas laut tepi pantai. Pada hari Sabtu 15 Oktober 2016, masjid ini diresmikan langsung oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo. Masjid megah nan indah penuh pesona ini memiliki sejarah yang panjang sampai akhirnya menjadi Ikon kebanggaan warga Kayong Utara. Masjid ini dibangun di pesisir pantai dengan badan Masjid sebagian besar dibangun di atas laut, sehingga seolah Masjid ini terapung di atas laut dan membuat masjid ini begitu indah di pandang mata. Pada pulau yang dijadikan sebagai acara tahunan Sail Karimata ini, Jokowi mengatakan dalam pembukaan Sail Karimata 2016, Kabupaten Kayong Utara memiliki potensi

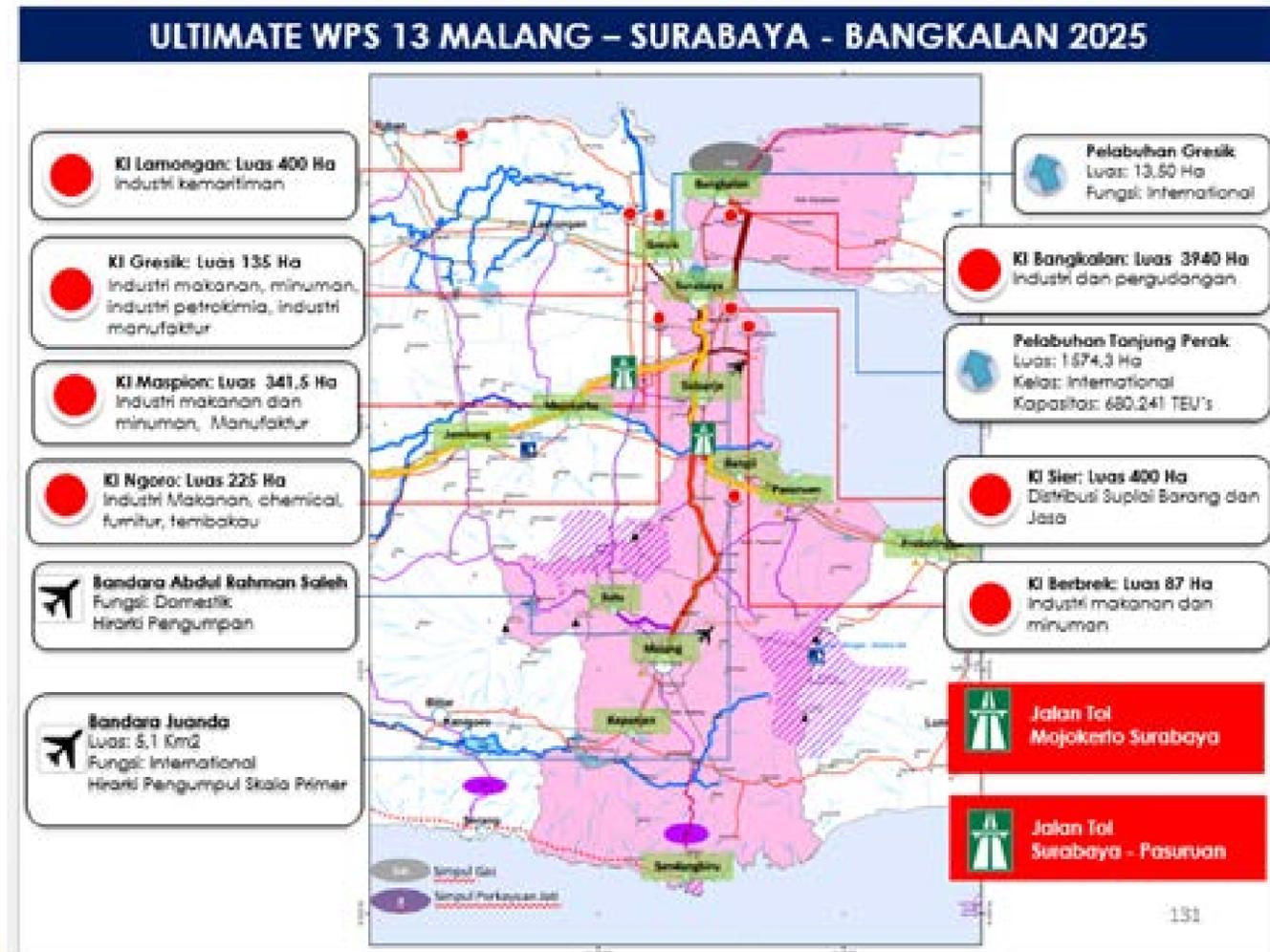
alam yang pas untuk sektor pariwisata. Dengan berlangsungnya acara Sail Selat Karimata 2016, pertumbuhan ekonomi di daerah itu terus meningkat. Penyelenggaraan Sail Selat Karimata 2016 di Pantai Pulau Datok, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, merupakan upaya menggalang keterpaduan, sinergi program serta anggaran lintas Kementerian/

Lembaga mendukung dan memperkenalkan pariwisata Indonesia. Dukungan infrastruktur permukiman di Kabupaten Kayong Utara ini diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan, meningkatkan perekonomian daerah mendukung Kabupaten Kayong Utara sebagai tujuan wisata nasional dan internasional. **(INI/InfoBPIW)**



Sumber: Dok.BPIW

Wilayah Pengembangan Strategis 13 Malang- Surabaya- Bangkalan



Ultimate

Arah pembangunan infrastruktur PUPR sampai dengan tahun 2025 di WPS 13 Malang – Surabaya – Bangkalan – diantaranya adalah pembangunan jalan tol Mojokerto Menuju Surabaya sepanjang 36,27. Pembangunan jalan tol Surabaya menuju Pasuruan. Selain jalan, arah pembangunan infrastruktur PUPR pada WPS 13 ini adalah pembangunan Pelabuhan Tanjung Perak dan pembangunan pelabuhan Gresik. Selain itu juga pembangunan Bandara Abdul Rahman Saleh dan juga Bandara Juanda, Pembangunan Kawasan Industri di Bangkalan, Sier, Berbek, Gresik, Maspion dan juga Ngoro.

Program Utama 2017

Pada program utama WPS 13 Malang-Surabaya-Bangkalan- Sampai dengan tahun 2017, infrastruktur PUPR yang dibangun difokuskan pada pembangunan jalan, diantaranya adalah pembangunan Jalan Tol Mojokerto menuju Surabaya, pembangunan jalan tol Surabaya menuju Pasuruan, Selain itu ada juga pembangunan Embung Sanganom kabupaten Pasuruan, pembangunan Embung Cangkerman, dan dibangunnya IPLT Kota Batu.

Wilayah Pengembangan Strategis 14 Surabaya – Pasuruan - Banyuwangi

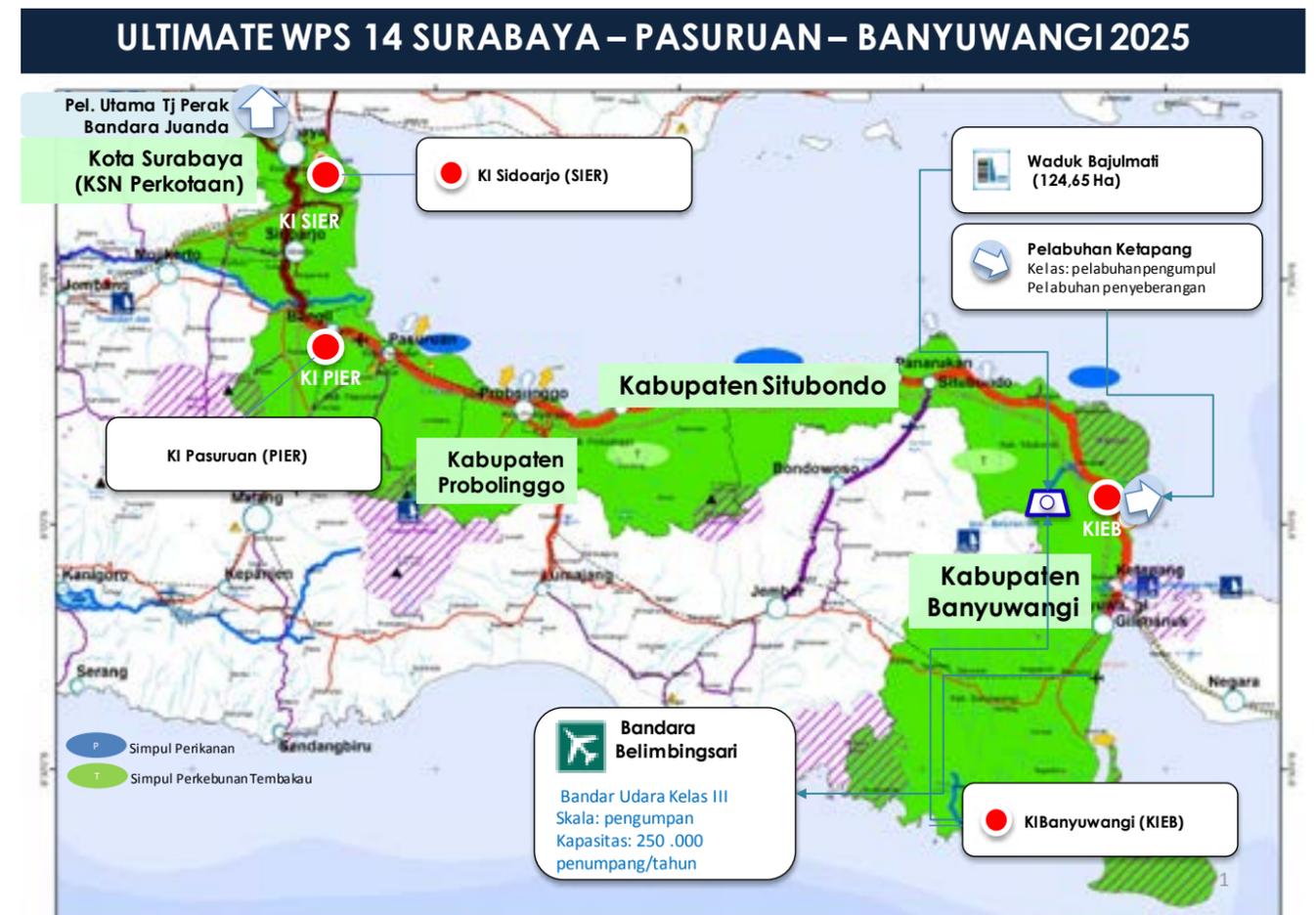
ULTIMATE

Arah pembangunan pada Wilayah Pengembangan Strategis Surabaya – Pasuruan - Banyuwangi (WPS 14) adalah pembangunan infrastruktur yang mendukung Kawasan Industri (KI) yang berada pada WPS 14, mendukung Pelabuhan Ketapang dan pembangunan Waduk Bajulmati sekaligus akses menuju ke Bandar Udara Belimbingsari, Bandar Udara Kelas III. Terdapat 5 KI pada WPS 14, yaitu KI Pasuruan, KI Sidoarjo dan KI Banyuwangi.

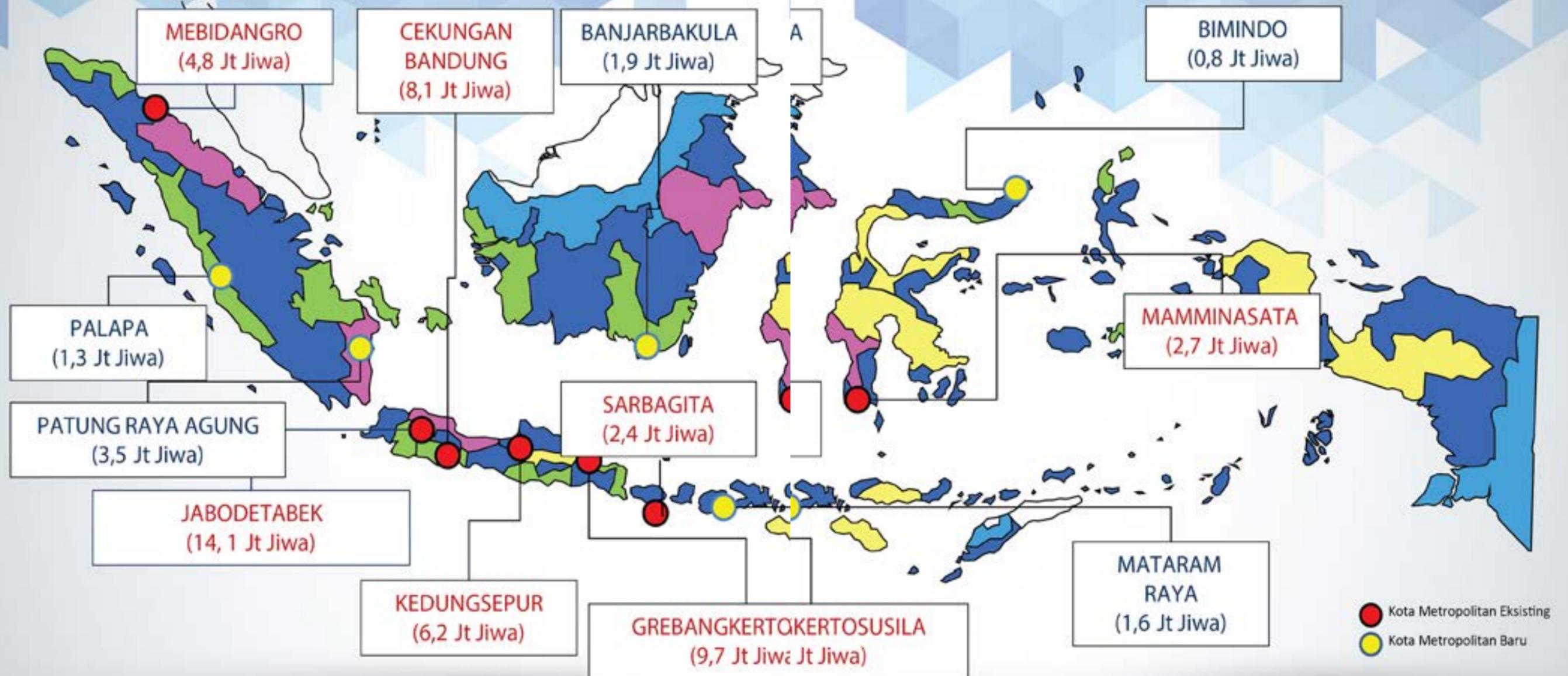
Program Utama

Program utama pada Wilayah Pengembangan Strategis Surabaya-Pasuruan - Banyuwangi (WPS 14) adalah dari sektor Sumber Daya Air terdapat lanjutan pembangunan jaringan irigasi Waduk Bajulmati di Kabupaten Banyuwangi, pembangunan Embung Sanganom dan pembangunan Intake dan jaringan Pipa Transmisi Air Baku IKK Krucil dan

IKK Gading. Dari sektor Bina Marga, terdapat pembangunan Jembatan Karamasan, rekonstruksi ruas jalan Gempol – batas Kota Bangil – batas Kota Pasuruan, rehabilitasi jalan bis kota rute Situbondo – Bajulmati, pembangunan Lingkar Barat Banyuwangi dan Lingkar Barat Rogojampi, pembangunan akses menuju Bandara Blimbingsari dan pembangunan jalan Tangkinol – Malang Sari – Kendenglemu – Glenmore. Dalam sektor Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan melakukan peningkatan infrastruktur drainase perkotaan, peningkatan infrastruktur tempat pengolahan sampah terpadu/3R dan optimalisasi SPAM di kawasan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Terkait dengan sektor Penyediaan Perumahan, terdapat pembangunan rusunawa di Kabupaten Pasuruan dalam rangka mendukung Kawasan Industri (KI).



KETERPADUAN TERHADAP PENGEMBANGAN KAWASAN METROPOLITAN 2015-2019 (PERKOTAAN)



Untuk mendukung keterpaduan terhadap pengembangan kawasan metropolitan, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah telah menginisiasi berbagai program terkait pengembangan kawasan metropolitan 2015 hingga 2019 (perkotaan) diantaranya kota metropolitan eksisting dan kota metropolitan baru yang meliputi Mebidangro dan Palapa.

Total Jumlah Penduduk

74,2 Juta Jiwa

Teknologi Bidang Jalan dan Jembatan Mendukung 10 KSPN

Bila membandingkan kondisi sektor pariwisata Indonesia kini dengan beberapa tahun ke belakang, tentu akan muncul anggapan bahwa Indonesia sudah terlalu lama mengesampingkan sektor pariwisata sebagai pilihan untuk mendorong daya saing negara. Masalah klasik kerap muncul seperti budget yang terlalu minim, sehingga penanganan pariwisata terkesan bersumber dari dana yang "asal ada" saja. Di era sekarang ini, pariwisata ditempatkan sebagai sektor unggulan, selain infrastruktur, maritim, pangan dan energi. Target tinggi pun telah dicanangkan yakni tercapainya 20 juta wisatawan manca negara (wisman) di tahun 2019.

Indonesia pada tahun 2015 dikunjungi 10,4 juta wisman atau naik 10,3 persen dari tahun sebelumnya. Tapi itu pun masih kalau jauh dibandingkan dengan dua negara tetangga kita, Malaysia dan Thailand.

Perbaikan terus dilakukan dan kini patut disyukuri bahwa pariwisata telah menjadi fokus pemerintah. Eksistensi pariwisata Indonesia pun semakin nyata di mata dunia dan bahkan dipercaya oleh lembaga finansial dunia. Hal tersebut tercermin dari turut sertanya *World Bank* dalam membantu Indonesia

menyelenggarakan infrastruktur mendukung kawasan pariwisata. Dalam waktu dekat, akan ada 3 (tiga) dari 10 (sepuluh) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) atau yang sering disebut "Bali Baru" yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Candi Borobudur (Jawa Tengah) dan Mandalika Lombok (Nusa Tenggara Barat), yang akan mendapatkan support dari lembaga keuangan internasional ini. Ketiga kawasan tersebut menjadi destinasi prioritas yang tengah diseriusi oleh Kementerian Pariwisata.

Teknologi jalan yang efektif dan efisien mendukung pengembangan infrastruktur di KSPN

Pembangunan infrastruktur seperti bandara ataupun jalan penghubung, menjadi salah satu kunci keberhasilan pengembangan sektor pariwisata. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melakukan perencanaan serta pemrograman dukungan akses infrastruktur menuju dan dari lokasi KSPN.

Dengan kondisi keuangan negara yang belum mencukupi dalam

pengembangan infrastruktur, dibutuhkan sentuhan inovasi teknologi yang menawarkan performa yang baik namun dengan biaya yang lebih murah. Apalagi dukungan dana dari World Bank tentu harus bisa dimanfaatkan dengan efektif serta efisien menjadi infrastruktur yang handal.

Dalam usaha menggapai penyelenggaraan infrastruktur pendukung kawasan pariwisata yang efektif dan efisien di atas, Badan Litbang Kementerian PUPR berkolaborasi dengan BPIW mewujudkan infrastruktur yang resilient di negeri ini. Badan Litbang Kementerian

PUPR memiliki banyak teknologi khususnya di bidang jalan dan jembatan yang bisa diaplikasikan dalam pembangunan jalan penghubung dari satu titik ke titik lainnya pada suatu KSPN. Beberapa teknologi yang dihasilkan oleh Badan Litbang PUPR di bawah ini sangat tepat untuk dimanfaatkan agar pembangunan infrastruktur jalan di KSPN tersebut bisa terselenggara dengan lebih efektif dan efisien oleh sentuhan inovasi.

1. Teknologi Lapis Pondasi Pasir Aspal (LPPA) atau Sand Base, teknologi ini berupa teknologi

campuran aspal panas yang menggunakan agregat lokal berupa pasir sekitar 90% sebagai pengganti agregat standar. Sand Base digunakan sebagai lapis pondasi pada konstruksi perkerasan lentur. Manfaat lain dari penggunaan Sand Base adalah dapat mengurangi ketergantungan pada agregat standar yang sulit didapatkan pada daerah yang melimpah dengan bahan pasir, seperti yang jamak dijumpai di Kalimantan Tengah, Pulau Bintan, Bangka, dan Belitung. Pemanfaatan Sand Base juga mampu dapat menghemat penggunaan campuran aspal hingga 30% dengan menggunakan material lokal. Sand Base telah diaplikasikan di Palangkaraya, Pangkalan Bun (Kalimantan Tengah) serta Pulau Bangka.

2. Otta Seal, penggunaan teknologi Otta Seal banyak digunakan sebagai metode pembangunan jalan pedesaan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena metode yang dikembangkan pertama kali di Norwegia ini dinilai cocok dengan kondisi dan iklim Indonesia. Di samping itu Otta Seal terbukti lebih ekonomis dan lebih tahan lama hingga 50%-60% lebih awet dibandingkan metode pembangunan jalan lain. Teknologi ini terdiri

dari single dan double Otta Seal. Salah satu jenis seal yang dibuat dengan menggunakan agregat bergradasi dan aspal berviskositas rendah dengan kuantitas yang cukup banyak dan dipadatkan. Akibat proses pemadatan dan lalu lintas, lapis pengikat akan naik ke atas dan mengikat agregat. Sehingga dengan demikian kekuatan pada Otta Seal akan dihasilkan oleh kemampuan lapis pengikat untuk mengikat agregat dan interlocking antara agregat itu sendiri. Perawatan yang dibutuhkan pada teknologi ini juga relatif lebih mudah dan dalam pengerjaannya pun tidak membutuhkan tenaga kerja yang sangat terampil. Teknologi ini sangat cocok diterapkan untuk jalan dengan volume lalu lintas yang rendah, seperti jalan akses menuju kawasan pariwisata yang berkarakter perdesaan.

3. Slurry Seal untuk Pemeliharaan Preventif, teknologi ini adalah

campuran dari aspal emulsi mantap lambat, agregat halus dengan gradasi menerus, bahan pengisi, serta air. *Slurry Seal* merupakan campuran yang aman terhadap kebakaran, karena emulsi berbasis air maka tidak memiliki titik nyala dan tidak mudah terbakar. Karena berbasis air juga, aspal emulsi tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi pekerja. *Slurry Seal* lebih efektif untuk pemecahan masalah utama, yaitu pengaruh oksidasi berlebihan pada permukaan perkerasan eksisting. Untuk itu penggunaan *Slurry Seal* ke permukaan perkerasan untuk menghambat pelepasan butir, menutup retak halus, dan meningkatkan gesekan permukaan. Namun penggunaan *Slurry Seal* tidak akan efektif apabila untuk menangani perkerasan yang mengalami retakan yang luas atau pada perkerasan yang sudah mengalami fatik. Dalam teknologi ini, kita akan mendapatkan penghematan dari segi penggunaan bahan bakar serta pengurangan

emisi gas buang, sehingga menjadi lebih ramah lingkungan. *Slurry Seal* sangat berguna sebagai bentuk pemeliharaan preventif.

4. Teknologi Material Ringan Mortar Busa, produk ini merupakan optimalisasi penggunaan busa dengan mortar (pasir+semen+air) yang diaplikasikan dengan bahan lokal sebagai material timbunan dan pondasi jalan. Spesifikasi ini dimaksudkan sebagai acuan dan pegangan dalam menilai kesesuaian mutu material dengan mortar-busa sebagai bahan timbunan jalan atau pondasi jalan. Ada pun tujuan dari teknologi ini

adalah untuk mendapatkan mutu material ringan yang memenuhi syarat fisik untuk perencanaan dan pelaksanaan dengan campuran pasir, semen, air dan busa. Timbunan ringan dari mortar busa ini dapat memberikan daya dukung yang optimal sebagai timbunan badan jalan serta sebagai pondasi perkerasan jalan yang dibangun di atas tanah lunak karena memiliki desain kekuatan yang cukup tinggi namun dengan tingkat densitas yang ringan, sehingga diharapkan dapat mengurangi masalah

stabilitas dan penurunan timbunan maupun tekanan lateral berlebih pada abutmen jembatan. Timbunan ini merupakan solusi yang potensial untuk penanganan stabilitas dan penurunan timbunan jalan di atas tanah lunak. Keunggulan dari teknologi mortar busa di antaranya dapat menghemat biaya hingga 70 persen dan juga dapat menghemat waktu pengerjaan hingga 50 persen. Selain itu kelebihan lainnya adalah ramah lingkungan karena menggunakan lebih sedikit material konstruksi. Saat ini teknologi mortar busa telah diaplikasikan di Jembatan Kedaton (Cirebon), Pangkalan Bun (Kalimantan Tengah) dan yang terkini pada pembangunan jalan layang Antapani di Bandung. (Balitbang)

Slurry Seal lebih efektif untuk pemecahan masalah utama, yaitu pengaruh oksidasi berlebihan pada permukaan perkerasan eksisting. Untuk itu penggunaan *Slurry Seal* ke permukaan perkerasan untuk menghambat pelepasan butir, menutup retak halus, dan meningkatkan gesekan permukaan.



Teknologi yang dibuat litbang juga menyangkut proses pengaspalan

Sail Karimata 2016

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah turut ikut serta dalam penyelenggaraan acara tahunan Sail Karimata yang diadakan di Pulau Karimata. Pada kesempatan ini, BPIW menampilkan panel berupa penjelasan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), Development Plan WPS 20 dan Rencana Strategis (Renstra). Berikut adalah beberapa dokumentasinya.



Booth BPIW di acara Sail Karimata



Pejabat setempat yang menghadiri Sail Karimata



Kegiatan di acara Sail Karimata



Staf BPIW sedang memberikan penjelasan

Kunjungan Kepala BPIW ke Danau Toba

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Rido Matari Ichwan beserta jajaran berkunjung ke daerah pengembangan kawasan pariwisata, Danau Toba. Dalam kesempatan ini, Kepala BPIW beserta jajaran berkesempatan untuk koordinasi dengan 2 Bupati di daerah Danau Toba.



Kepala BPIW dan Bupati Samosir Berfoto Bersama di depan Balai Batak Toba.



Survey bersama Bupati Samosir dan SKPD di Pantai Bebas Parbaba



Survey bersama Bupati Samosir di Objek Wisata Budaya Batu Kursi Raja Siallagan



Koordinasi dengan Bupati Samosir terkait Pelabuhan Simanindo

Menjaga Keseimbangan Kehidupan Kerja Dengan Kehidupan Pribadi



Setiap perusahaan pasti menginginkan pegawainya bekerja produktif. Dan sebagai pekerja tentu ingin bisa menjalani kehidupan di luar pekerjaan dengan baik. Masalah sering terjadi antara pekerjaan dan kehidupan tidak seimbang atau terkesan saling berkejaran satu sama lain. Tapi perlu diingat, Kesejahteraan pikiran adalah hal yang terpenting dalam hidup, agar dapat terciptanya keseimbangan dalam kehidupan kerja. Berikut adalah beberapa tips untuk hidup yang lebih seimbang antara kehidupan pribadi dan pekerjaan :

1. Rencanakan waktu istirahat anda

Lihat jadwal kerja Anda dalam seminggu, sisipkan jadwal untuk bertemu dengan keluarga atau teman-teman Anda, kemudian lakukan hal-hal positif bersama mereka untuk bisa membangkitkan semangat Anda. Atau mungkin Anda berencana untuk pergi kencan dengan pasangan seperti mengajaknya nonton, makan malam atau sekedar jalan-jalan di taman maka Anda harus bisa mengatur jadwal Anda dengan lebih intensif. Dengan pengaturan jadwal yang baik, Anda tidak perlu membatalkan janji yang sudah dibuat. Cobalah pergi bersama pasangan Anda dan matikan *smartphone* saat bertemu. Tambahkan juga satu hari dalam sebulan untuk kencan bersama pasangan Anda, kemudian lihatlah hal positif apa yang akan terjadi. Lakukan hal-hal tersebut setiap

Anda memiliki waktu senggang, manfaatkan akhir pekan Anda dengan sebaik mungkin.

2. Hindari aktivitas yang membuang waktu dan tenaga

Banyak orang membuang waktu yang mereka miliki untuk sesuatu yang kurang bermanfaat. Sebagai contoh ketika Anda bekerja bersama teman dekat maka akan ada banyak waktu yang terbuang percuma hanya untuk sekedar mengobrol dan bergosip. Selain itu terlalu sering membuka sosial media, melakukan panggilan telepon pribadi dan lain sebagainya juga termasuk membuang-buang waktu dan tenaga saat Anda sedang bekerja. Hal terbaik untuk mengatasinya adalah dengan mengatur ulang aktivitas yang sudah Anda lakukan. Kurangilah hal-hal yang tidak mendukung karir atau kehidupan sehari-hari Anda karena hal tersebut hanya akan mengganggu keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan Anda. Dengan mengurangi hal-hal tersebut maka pekerjaan Anda akan lebih cepat selesai dan Anda bisa pulang lebih cepat.

3. Atur ulang kepentingan Anda

Daripada menghabiskan banyak waktu untuk berjalan jauh saat ingin membeli sesuatu, bukanlah lebih efisien jika Anda membelinya melalui toko online dan menerimanya dari kurir. Anda juga bisa mempekerjakan seseorang untuk merawat halaman atau menyelesaikan pekerjaan rumah Anda sehingga Anda memiliki waktu luang yang lebih banyak. Mungkin memang akan menghabiskan uang lebih banyak

namun hal tersebut akan sebanding dengan waktu luang yang akan Anda dapatkan.

4. Olahraga

Mungkin Anda akan sedikit kesulitan meluangkan waktu untuk berolahraga disela-sela rutinitas yang Anda lakukan. Tetapi, olahraga memang sangat penting dan Anda perlukan karena bisa sangat membantu Anda dalam meningkatkan stamina dan kemampuan konsentrasi Anda saat bekerja. Berolahraga juga akan membuat Anda menjadi lebih waspada dengan pekerjaan-pekerjaan yang sedang Anda kerjakan.

5. Menenangkan diri sejenak

Perubahan harus dilakukan secara berkala supaya manfaatnya benar-benar bisa dirasakan. Jangan hanya semangat pada saat-saat awalnya saja lakukanlah secara berkala. Saat Anda sedang berada pada jadwal yang padat maka Anda bisa mencoba untuk meluangkan waktu sekitar 10-15 menit untuk melakukan hal-hal yang bisa menambah energi seperti mandi, membaca novel, berjalan-jalan, bersepeda atau mendengarkan musik. Anda juga bisa mengambil waktu untuk istirahat sejenak untuk sekedar berlibur bersama keluarga atau pasangan saat Anda sedang benar-benar jenuh dengan pekerjaan yang sedang Anda kerjakan. Meskipun hal tersebut kelihatan remeh tapi Anda perlu mencobanya karena hal tersebut benar-benar bisa memberikan Anda sedikit kebahagiaan untuk menenangkan pikiran Anda yang sedang jenuh.

Pembangunan Infrastruktur Harus Berkelanjutan

Acep Purnama

Bupati Kuningan Jawa Barat

Pembangunan infrastruktur terus dilakukan di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Menurut Bupati Kuningan, Acep Purnama, setidaknya ada dua pembangunan infrastruktur yang saat ini sedang dikerjakan Kementerian PUPR. Kedua pembangunan infrastruktur tersebut, yakni pertama, pembangunan bendungan yang berada di Desa Randusari, Kecamatan Cibeureum. Bendungan yang dibangun sejak tahun 2013 itu diperkirakan akan selesai dibangun akhir 2017. "Nantinya bendungan dengan nilai kontrak sebesar Rp 464 miliar tersebut akan mengairi 2.000 ha sawah di Kuningan dan 1.000 ha di Brebes, Jawa Tengah. Pembangunan bendungan sudah mencapai 27% atau melebihi target 25%," ujar Acep pada awal Oktober lalu.

Selain mengairi persawahan, nantinya bendungan ini akan dimanfaatkan untuk beberapa keperluan yang akan dirasakan langsung masyarakat, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) mikrohidro sebesar 535 kilowatt, pengendali banjir dengan mengurangi debit di puncak, dan penyediaan air baku 300 liter per detik. Untuk PLTA, Kementerian PUPR direncanakan akan menyediakan intak-

nya untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro tersebut. Pembangunan infrastruktur yang kedua yang saat ini sedang dilakukan Kementerian PUPR di daerah tersebut adalah program perumahan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Sebanyak 598 rumah dari empat desa telah mendapat bantuan dari program tersebut pada tahun 2015 lalu. Sedangkan untuk tahun ini sebanyak 1.704 unit.

"Bantuan rumah swadaya ini untuk membahagiakan masyarakat menuju keadilan yang sejahtera. Jangan lihat nilai bantuannya dari pusat yang mencapai Rp 10 juta dan pemerintah daerah Rp 4 juta per unit rumah, tetapi bantuan rumah swadaya ini untuk memotivasi warga agar bergotong royong dalam membangun rumah. Target kami menyelesaikan 8 ribu rumah lagi," tutur Acep.

Kedua program tersebut menurut Acep sangat dirasakan masyarakat baik di saat ini maupun di masa yang akan datang. Bagi Acep hal itulah yang menjadi hakikat dari sebuah pembangunan infrastruktur, yakni benar-benar dirasakan masyarakat.

Tidak hanya itu, Acep berpendapat sudah selayaknya sebuah pembangunan infrastruktur dilakukan secara terus menerus atau berkelanjutan. Dengan cara ini, maka persoalan infrastruktur yang dihadapi masyarakat dapat diatasi dengan lebih optimal. "Pembangunan segala bidang termasuk infrastruktur, harus berkelanjutan. Jadi semangat saya adalah semangat pembangunan yang terus berkelanjutan atau terus menerus," tegas Acep.

Saat ini Kabupaten Kuningan sedang giat-giatnya melakukan pembangunan di segala bidang seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian, pertanian, pariwisata, serta pembangunan infrastruktur. Semua kegiatan bidang pembangunan tersebut menurut Acep menuju kesejahteraan masyarakat. Hal

ini sesuai dengan visi Kabupaten Kuningan yakni Kuningan yang Mandiri, Agamis, dan Sejahtera.

Acep juga menyampaikan bahwa selain bendungan dan pembangunan perumahan, di Kuningan juga sedang melakukan beberapa program pembangunan yang diprioritaskan dalam jangka pendek, seperti konservasi alam, pendidikan lingkungan dan pariwisata, yakni menyelesaikan pembangu-

nan Kebun Raya Kuningan atau KRR, seluas 155,4 ha. Kebun raya yang sudah dibangun sejak tahun 2006, telah banyak memiliki pohon-pohon yang beraneka ragam. Kebun raya ini nantinya akan dijadikan area pariwisata.

Tidak hanya itu, menurut Acep pemerintahannya saat ini sedang menyelesaikan pembangunan jalan lingkar Sampora-Kertawangunan sepanjang 13,7 km. Jalan tersebut ditargetkan dapat diselesaikan pada 2018 mendatang. "Sampai saat ini masih dibutuhkan bantuan dari pemerintah pusat. Kita berharap jalan tersebut bisa mengurangi kemacetan dari Cirebon ke Kuningan. Jarak antara Kabupaten Kuningan dengan Cirebon mencapai 35 km," ujar Acep.

Dengan pembangunan yang dilakukan secara berkelanjutan, Acep meyakini akan mempercepat kesejahteraan masyarakat. "Saya juga berharap anggaran dari pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR, bisa sampai ke daerah secara merata. Dengan demikian manfaat dari pembangunan infrastruktur benar-benar dirasakan secara merata di seluruh daerah," tukas Acep. **Hendra Djamal**

"Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Tegal akan Cepat Terwujud Apabila Banyak Pihak Mau Turut Mendukung. Sebab Kemampuan Daerah Masih Mengalami Banyak Keterbatasan"

